



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Terhadap

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA)
PROVINSI DKI JAKARTA**

Tentang

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**



**Disampaikan oleh: Ir. Sunggul Sirait
Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Pada tanggal 29 Juli 2024**

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Terhadap

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Tentang

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Disampaikan oleh: Ir. Sunggul Sirait

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh;

Salam sejahtera bagi kita semua

Om SwastiAstu Namu Buddhaya

Salam Kebajikan, Rahayu

Yang terhormat;

- Ketua, Wakil Ketua, dan segenap Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Pj Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Undangan, dan hadirin lainnya;

MERDEKA !

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mengingat berbagai limpahan nikmat-NYA bagi kita sekalian, dan semoga berkelanjutan berikut limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-NYA.

Syukur Alhamdulillah saat ini kita masih berkesempatan hadir baik secara fisik dalam Rapat Paripurna Dewan dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi sebagaimana tersebut diatas.

Sebelum kami menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan, izinkanlah pada forum yang terhormat ini saya mewakili Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan penghargaan

dan apresiasi atas kerja keras semua pihak dalam mendukung terlaksananya berbagai program pembangunan di DKI Jakarta. Semoga upaya kita bersama dapat terus meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh warga Jakarta.

Yth, Pimpinan Rapat, Pj Gubernur dan hadirin peserta rapat;

Kami akan menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Rencana Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

1. Evaluasi terhadap APBD

Kami mencatat bahwa APBD awal yang diketok sebesar Rp83,7 triliun mengalami penurunan menjadi Rp79,52 triliun dalam APBD Perubahan. Penurunan ini memerlukan penjelasan yang rinci dan transparan dari Pemprov DKI Jakarta. Penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penurunan anggaran ini sangat penting. Apakah terjadi penurunan pendapatan daerah, efisiensi anggaran, atau apakah ada program kerja Pemprov yang ditunda atau dibatalkan?

Sebagaimana yang dilaporkan oleh PJ Gubernur pada tanggal 25 Juli lalu, perolehan Pendapatan Daerah Khusus Jakarta Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 71,07 triliun atau 0.57 persen melebihi rencana yang ditargetkan pada APBD Jakarta yaitu Rp. 70,66 triliun, untuk itu kami berikan apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Namun, pelampauan Pendapatan Daerah sebesar 0.57 persen ternyata **belum menjadi hasil kinerja maksimal** dari Pemprov Daerah Khusus Jakarta dengan banyaknya pengelolaan aset-aset daerah yang belum dikelola dengan baik. Apalagi kedepannya kita menghadapi Jakarta pasca Ibukota, pendataan aset-aset menjadi poin krusial dalam memaksimalkan perolehan pendapatan daerah. *Bagaimana rencana Pemprov mensiasati hal ini?*

Kami berharap Pemprov dapat memberikan rincian yang jelas mengenai hal ini. **Mohon penjelasannya.**

2. Evaluasi Program Pendidikan

Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi realisasi anggaran pendidikan sebesar Rp 8,87 triliun atau mencapai 93,38 persen dari target yang telah ditetapkan. Namun, kami menilai bahwa meskipun persentase realisasi ini cukup tinggi, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian khusus dan penjelasan lebih lanjut.

Pertama, berdasarkan temuan kami di lapangan, terdapat banyak sekali permasalahan di mana anak dan remaja usia belajar kehilangan bantuan dari KJP atau KJMU sejak 2023, bahkan ada yang dari tahun 2022, hingga mereka mengalami kendala dalam proses pendidikannya. Dalam laporan yang disampaikan PJ. Gubernur, pada belanja daerah dalam Program Pengelolaan Pendidikan, masih ada alokasi dana

630 miliar yang belum tersalurkan. Ini bukan jumlah yang sedikit. Jika 630 miliar tersebut disalurkan dalam program-program KJP dan KJMU, akan ada ribuan anak dan remaja usia belajar yang dapat terbantu. Bagi kami, persoalan tersebut sangat memprihatinkan, karena hingga sekarang situasi ini masih berlanjut. Apa solusi yang telah dilakukan oleh Pemprov terhadap permasalahan ini?

Kedua, kami menyoroti pentingnya memastikan bahwa anggaran yang telah direalisasikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di DKI Jakarta. Kami meminta laporan rinci mengenai program-program yang telah dilaksanakan, serta dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah yang masih kekurangan fasilitas dan tenaga pengajar yang kompeten.

Ketiga, Fraksi PDI Perjuangan menekankan perlunya evaluasi terhadap efektivitas program-program yang telah dijalankan. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata bagi siswa, guru, dan masyarakat luas. Evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan dari setiap program telah tercapai dan jika tidak, langkah-langkah apa yang akan diambil untuk memperbaikinya.

Kami juga menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dalam penggunaan anggaran pendidikan. Transparansi dan akuntabilitas harus dijaga untuk mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa dana pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan siswa dan peningkatan kualitas pendidikan.

Dengan demikian, Fraksi PDI Perjuangan berharap penjelasan dari Pemprov DKI Jakarta terkait realisasi anggaran pendidikan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian dan tantangan yang dihadapi. Kami siap mendukung langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di DKI Jakarta demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Mohon penjelasannya.

3. Evaluasi Program Kesehatan Masyarakat

Realisasi anggaran Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp2,81 triliun atau 96,72 persen dari anggaran Rp2,91 triliun memang menunjukkan kinerja yang cukup baik. Namun, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa angka realisasi yang tinggi ini perlu ditinjau lebih dalam dari sisi kualitas dan efektivitas penggunaan anggaran tersebut.

Pertama, kami meminta penjelasan rinci terkait penggunaan anggaran sebesar Rp2,81 triliun ini. Apakah alokasi dana tersebut benar-benar telah digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat? Kami berharap ada laporan yang jelas mengenai program-program spesifik yang telah

dilaksanakan, seperti peningkatan fasilitas kesehatan, pengadaan alat medis, dan pelatihan tenaga kesehatan.

Kedua, kami menyoroti sisa anggaran yang tidak terserap sebesar 3,28 persen. Meskipun persentase ini tampak kecil, namun dalam nominal, jumlah tersebut mencapai Rp100 miliar. Kami meminta penjelasan mengenai kendala yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran ini. Apakah terdapat proyek yang tertunda, atau adakah efisiensi yang dilakukan? Jika efisiensi dilakukan, kami berharap itu bukan berarti pengurangan kualitas pelayanan kesehatan.

Ketiga, efektivitas program-program kesehatan juga menjadi perhatian kami. Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang telah direalisasikan memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Adakah indikator-indikator kinerja yang menunjukkan peningkatan dalam hal aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan? Misalnya, apakah ada peningkatan jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan, penurunan angka penyakit, atau peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan?

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya pengawasan dan transparansi dalam penggunaan anggaran kesehatan. Kami mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selain itu, kami meminta adanya audit independen untuk menilai penggunaan anggaran ini agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakefektifan dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, meskipun realisasi anggaran Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat mencapai 96,72 persen, kami menekankan perlunya penjelasan yang lebih rinci dan kritis mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran tersebut. Kami berharap Pemprov DKI Jakarta dapat memberikan penjelasan yang transparan dan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di masa mendatang.

4. Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Realisasi anggaran Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebesar Rp5,23 triliun atau 92,02 persen dari anggaran Rp5,68 triliun memang menunjukkan bahwa sebagian besar dana telah digunakan. Namun, Fraksi PDI Perjuangan memandang perlu adanya evaluasi kritis terhadap penggunaan anggaran tersebut, mengingat pentingnya program ini bagi mobilitas dan kesejahteraan masyarakat Jakarta.

Pertama, kami meminta penjelasan rinci terkait penggunaan anggaran sebesar Rp5,23 triliun ini. Apakah alokasi dana tersebut telah benar-benar digunakan untuk meningkatkan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat dirasakan

langsung oleh masyarakat? Kami berharap ada laporan yang jelas mengenai proyek-proyek spesifik yang telah dilaksanakan, seperti perbaikan jalan, pembangunan jembatan, dan pengembangan sistem transportasi umum.

Kedua, kami menyoroti sisa anggaran yang tidak terserap sebesar 7,98 persen atau sekitar Rp450 miliar. Meskipun persentase ini tampak kecil, namun dalam nominal, jumlah tersebut cukup signifikan. Kami meminta penjelasan mengenai kendala yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran ini. Apakah terdapat proyek yang tertunda, atau adakah efisiensi yang dilakukan? Jika efisiensi dilakukan, kami berharap itu bukan berarti pengurangan kualitas infrastruktur atau pelayanan transportasi.

Ketiga, efektivitas program-program LLAJ juga menjadi perhatian kami. Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang telah direalisasikan memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas lalu lintas dan angkutan jalan. Adakah indikator-indikator kinerja yang menunjukkan peningkatan dalam hal kelancaran lalu lintas, pengurangan kemacetan, atau peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi umum? Misalnya, apakah ada peningkatan jumlah pengguna transportasi umum, penurunan waktu perjalanan, atau peningkatan keselamatan di jalan raya?

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya pengawasan dan transparansi dalam penggunaan anggaran LLAJ. Kami mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selain itu, kami meminta adanya audit independen untuk menilai penggunaan anggaran ini agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakefektifan dalam pelaksanaannya.

Keempat, kami juga mengkritisi kurangnya inovasi dalam penanganan masalah lalu lintas dan angkutan jalan. Meskipun anggaran besar telah dialokasikan, kemacetan masih menjadi masalah utama di Jakarta. Kami meminta Pemprov DKI Jakarta untuk lebih proaktif dalam mencari solusi inovatif dan berkelanjutan, seperti pengembangan transportasi berbasis listrik, integrasi antar moda transportasi, dan penggunaan teknologi untuk manajemen lalu lintas.

Dengan demikian, meskipun realisasi anggaran Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mencapai 92,02 persen, kami menekankan perlunya penjelasan yang lebih rinci dan kritis mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran tersebut. Kami berharap Pemprov DKI Jakarta dapat memberikan penjelasan yang transparan dan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan kualitas lalu lintas dan angkutan jalan di masa mendatang.

Mohon penjelasannya.

5. Evaluasi Program Penanganan Sampah Ibukota

Realisasi anggaran Program Pengelolaan Persampahan sebesar Rp1,73 triliun atau 96,81 persen dari anggaran Rp1,79 triliun menunjukkan penggunaan dana yang hampir mencapai target. Namun, Fraksi PDI Perjuangan memandang perlu adanya evaluasi kritis terhadap efektivitas penggunaan anggaran tersebut. Kami meminta penjelasan rinci terkait bagaimana dana ini dialokasikan dan apakah telah memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan pengelolaan persampahan di Jakarta. Apakah program ini berhasil mengurangi volume sampah yang tidak terkelola, meningkatkan kapasitas Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), dan memperkuat sistem daur ulang sampah? Kami juga ingin mengetahui seberapa besar program ini melibatkan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah, serta apakah ada peningkatan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah yang lebih baik.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti sisa anggaran yang tidak terserap sebesar 3,19 persen atau sekitar Rp56 miliar. Kami meminta penjelasan mengenai alasan tidak terserapnya anggaran ini, apakah karena efisiensi atau ada kendala dalam pelaksanaan program. Kami juga mengkritisi apakah program pengelolaan persampahan ini sudah benar-benar efektif dalam mengatasi masalah sampah di Jakarta. Kami meminta Pemprov DKI Jakarta untuk lebih transparan dalam pelaporan penggunaan anggaran ini dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Evaluasi menyeluruh terhadap program ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah di Jakarta berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Mohon penjelasannya.

6. Evaluasi Program Air Bersih

Berikut adalah penjelasan terkait Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dari anggaran Rp1,93 triliun yang terealisasi sebesar Rp1,48 triliun atau 76,63 persen:

Realisasi anggaran sebesar 76,63 persen dalam Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) menandakan bahwa hampir seperempat dari total anggaran yang dialokasikan tidak terserap. Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa hal ini memerlukan penjelasan yang mendalam dari Pemprov DKI Jakarta. Apakah penyebab utama dari rendahnya realisasi anggaran ini? Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan proyek-proyek terkait pengelolaan sumber daya air atau adakah efisiensi yang dilakukan? Penyerapan anggaran yang kurang optimal ini dapat mengindikasikan adanya masalah dalam perencanaan atau eksekusi proyek yang perlu segera diatasi agar program-program terkait air dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Salah satu program yang direncanakan namun tidak terlaksana adalah perluasan cakupan layanan air bersih yang ditargetkan mencapai 100 persen pada tahun 2030. Meskipun ini merupakan target jangka panjang, rendahnya realisasi anggaran tahun 2023 menunjukkan adanya hambatan signifikan dalam upaya tersebut. Pemprov DKI Jakarta perlu memberikan penjelasan mengenai proyek-proyek spesifik yang tertunda atau gagal dilaksanakan serta langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk memastikan bahwa cakupan layanan air bersih dapat meningkat secara signifikan. Selain itu, kami juga meminta Pemprov untuk lebih transparan dalam melaporkan kendala yang dihadapi serta rencana pemulihan yang konkret guna memastikan anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap dengan lebih baik di masa mendatang dan program-program terkait air dapat memberikan dampak positif bagi warga Jakarta.

Mohon Penjelasannya.

7. Evaluasi Program Pengelolaan Cagar Budaya

Realisasi anggaran Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebesar Rp13,63 miliar atau 86,12 persen dari anggaran Rp15,82 miliar menunjukkan bahwa sebagian besar dana telah digunakan. Namun, Fraksi PDI Perjuangan memandang perlu adanya evaluasi kritis terhadap penggunaan anggaran tersebut. Salah satu masalah utama dalam pelestarian cagar budaya di Jakarta adalah kurangnya pemeliharaan dan restorasi yang tepat waktu terhadap bangunan-bangunan bersejarah. Banyak bangunan cagar budaya yang mengalami kerusakan akibat faktor usia dan kurangnya perawatan rutin, yang pada akhirnya dapat mengancam keberlanjutan warisan budaya ini. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pelestarian cagar budaya seringkali kurang optimal, menyebabkan beberapa proyek restorasi tertunda atau bahkan tidak terlaksana.

Selain itu, permasalahan lain yang mengemuka adalah keterlibatan masyarakat dalam pelestarian cagar budaya yang masih kurang maksimal. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, seperti melalui acara dan festival budaya, serta penggunaan teknologi untuk edukasi sejarah, hasilnya belum sepenuhnya memadai. Pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan cagar budaya, serta melibatkan komunitas lokal secara lebih aktif dalam proses pelestarian. Dengan demikian, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat, dapat berperan bersama dalam menjaga warisan budaya yang ada di Jakarta.

Mohon penjelasannya.

8. Realisasi Pembiayaan Daerah

Meskipun adanya SiLPA menunjukkan pengelolaan anggaran yang berhati-hati, jumlah sebesar Rp6,54 triliun menimbulkan beberapa pertanyaan kritis. Pertama, besarnya SiLPA bisa menjadi indikasi bahwa ada banyak proyek atau program yang tidak terlaksana sesuai rencana. Penundaan atau kegagalan pelaksanaan program tersebut dapat berdampak negatif pada masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari proyek-proyek tersebut.

Kedua, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti bahwa penyerapan anggaran yang tidak optimal sering kali disebabkan oleh masalah perencanaan dan eksekusi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengidentifikasi kendala yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki proses perencanaan dan eksekusi proyek. Hal ini penting agar anggaran yang telah dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Ketiga, meskipun penyertaan modal kepada BUMD merupakan langkah yang baik untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan layanan publik, kami mengingatkan agar pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut diperketat. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana penyertaan modal harus dijaga agar tidak terjadi penyimpangan dan dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.

Akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk lebih transparan dalam melaporkan penggunaan SiLPA dan rencana alokasi dana tersebut di tahun anggaran berikutnya. Penggunaan SiLPA harus direncanakan dengan baik dan difokuskan pada program-program yang memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.

Dengan demikian, meskipun adanya SiLPA menunjukkan adanya pengelolaan anggaran yang berhati-hati, Pemprov DKI Jakarta perlu mengevaluasi kembali proses perencanaan dan eksekusi anggaran agar anggaran yang dialokasikan dapat terserap dengan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Mohon penjelasannya.

Yth, Pimpinan Rapat, Pj Gubernur dan hadirin peserta rapat;

Demikianlah tadi telah kami sampaikan Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan secara ringkas dalam forum yang terhormat, sejuk, dan harmonis. Hal-hal lainnya yang dianggap penting akan disampaikan oleh para anggota Fraksi PDI Perjuangan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam rapat-rapat kerja pembahasan RAPERDA bersama Eksekutif Daerah.

Apabila ada hal-hal yang telah kami sampaikan tidak berkenan bagi Eksekutif Daerah, Legislatif Daerah, dan para pihak terkait, kami mohon maaf. Kami berharap bahwa saran dan kritik yang kami sampaikan dapat diterima sebagai upaya konstruktif untuk perbaikan bersama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta.

Kami juga mengingatkan kepada semua pihak untuk terus berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, serta memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Atas perhatian Pimpinan Rapat, Gubernur/Eksekutif Daerah, dan hadirin peserta rapat, kami sampaikan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua sehingga kita dapat terus bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyat dan tetap sehat walafiat.

Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan satu-dua bait pantun penambah semangat:

Ember Kosong Diisi Air Memutar Keran

Membeli Kain dari Kepompong Sutera

Mari kita bahas P2APBD 2023 secara Transparan

Anggaran Dibuka, Rakyat Sejahtera

Akhir pekan selesai saatnya masuk asrama

Dari Solo lanjut Yogyakarta

Serapan dan Pendapatan kita kulik bersama

P2APBD 2023 untuk Rakyat Jakarta

Wassalamualaikum Warakhmatullahi Wabarakhatuh

Jakarta, 29 Juli 2024

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

H. Prasetio


H. Prasetio Edi Marsudi, SH

Sekretaris,



Dwi Rio Sambodo, SE, MM

MERDEKA !



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERINDRA
(GERAKAN INDONESIA RAYA)
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

TERHADAP

**PIDATO PENJABAT GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA PADA
ACARA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

DALAM RANGKA

**PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023**

Disampaikan Oleh :

H. Munir, S.Ag., M.Pd.

JAKARTA,

SENIN, 29 JULI 2024

Bismillahirrahmanirrahim;

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh;

Shalom, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan. Salam Sejahtera bagi kita semua;

Yang Terhormat ;

- **Saudara Ketua, Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;**
- **Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;**
- **Saudara PJ. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;**
- **Para Anggota Forkopimda DKI Jakarta;**
- **Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;**
- **Rekan-rekan Pers dan Hadirin Yang Saya Hormati;**

Salam Indonesia Raya;

Dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai GERINDRA, marilah kita semua memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya, kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, Senin, 29 Juli 2024, dimana Rapat kali ini diselenggarakan dalam rangka, dengan harapan menjadi evaluasi dan perbaikan kinerja pembangunan bagi kemaslahatan warga Jakarta.

Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati;

Sebelum kami memulai pidato singkat mengenai pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta, izinkan kami menyampaikan apresiasi dan selamat Kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas diperolehnya Kembali predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari hasil LHP BPK-RI tahun 2023, hal ini merupakan

penghargaan tertinggi atas proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, semoga pencapaian ini semakin memotivasi Pemprov DKI Jakarta untuk terus lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD dimasa mendatang dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai kaidah *good governance*.

Mencermati pidato Saudara PJ Gubernur yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, pada Kamis, 25 Juli 2024 pekan lalu mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2023, Kami mengapresiasi dari kerja keras kita semua atas tercapainya realisasi pelaksanaan APBD Tahun 2023, khususnya pada aspek Pendapatan Daerah yang capaiannya melebihi rencana dari yang ditargetkan, selain pada aspek Belanja Daerah mencapai 92,55 persen, sehingga terdapat selisih anggaran atau SiLPA selama satu tahun pelaksanaan anggaran tahun 2023 didapati sebesar 6,54 triliun cukup mendekati ideal bagi serapan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Idealnya semua anggaran dapat terserap sepenuhnya.

Tentunya sangat dimaklumi, karena tidak selalu pelaksanaan anggaran setiap tahunnya dapat benar-benar tercapai suatu realisasi pendapatan dan belanja daerah hingga 100 persen, mengingat banyak faktor yang harus dipenuhi seperti masalah penyesuaian, keterlambatan atau tidak cukup waktu pelaksanaan, penundaan pembayaran, dan lain sebagainya.

Namun dari realisasi atas serapan anggaran yang telah dibelanjakan, yang sudah dicapai mendekati idealnya, sudah semestinya juga dapat mendorong gerak laju pertumbuhan perekonomian daerah,

memacu peredaran uang yang gilirannya ikut menumbuhkan laju peningkatan daya beli masyarakat, serta adanya sejumlah terobosan program dan dampaknya bagi kemajuan pembangunan di tengah masyarakat Kota Jakarta.

Meskipun kemudian, kenyataan berbeda, sebagaimana menurut data pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta sesuai Berita Resmi Statistik yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 6 Februari 2024 menunjukkan ekonomi Jakarta tahun 2023 tumbuh sebesar 4,96 persen, lebih lambat dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,25 persen. Bahkan tercatat pula, khusus mengenai struktur ekonomi Jakarta menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti dibandingkan tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, terdapat beberapa catatan dari Fraksi kami dalam menyimak penyampaian P2APBD Tahun Anggaran 2023 ini sebagaimana berikut:

1. Dari aspek Belanja Daerah, terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat langsung, dapat dilihat realisasinya pada Belanja Operasi, diantaranya pada Bantuan Sosial yang mencapai target 98,05 persen, dan pada Program Prioritas pada misi kedua, diantaranya Program Kesejahteraan Rakyat telah terealisasi sebesar 96,62 persen. Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD (P2APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, Buku V, Lampiran VII, dinyatakan bahwa: *"Belanja Bantuan Sosial tidak terserap 100% di antaranya disebabkan oleh verifikasi yang lebih selektif untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial KJP Plus dan KJMU, sehingga penyerapan*

khususnya untuk penerima baru kurang dari kuota yang dianggarkan". Namun dalam pengamatan kami, hingga saat ini masih terjadi banyaknya laporan dari masyarakat yang telah terdaftar dalam DTKS dan tercatat sebagai penerima manfaat, khususnya KJP Plus, selain Bansos lainnya, seperti BPJS Kesehatan, Kartu Lansia Jakarta belum mendapatkan haknya sejak tahun-tahun sebelumnya, termasuk pada tahun anggaran 2023, padahal beberapa warga yang melapor terdaftar dalam data penerima manfaat namun tidak mendapatkan kejelasan dari Pemprov DKI Jakarta. Hal tersebut sudah sejak awal telah kami sampaikan saat Pemandangan Umum Fraksi Gerindra tentang Raperda APBD Perubahan 2023, atau setahun yang lalu dimohon agar Bansos selain tepat sasaran juga harus ada pemerataan kesempatan bagi yang membutuhkan, khususnya ketika dilakukan pemutakhiran data di lapangan dengan melakukan sosialisasi secara komunikatif sehingga bagi warga yang berhak mendapatkan tidak merasa dirugikan.

Mohon Tanggapan !

2. Seperti halnya yang telah Fraksi Gerindra utarakan pada Pemandangan Umum Rapat Paripurna sebelumnya, yakni tahun 2023 yang lalu, tepatnya pada Penetapan Raperda APBD Tahun 2023 maupun saat Penetapan Raperda APBD Perubahan Tahun 2023, bahwa terkait masih banyaknya gedung sekolah yang perlu direhab, juga masalah kurangnya jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Menengah Atas seperti SMA/SMK yang dikelola oleh pemerintah karena masih belum dapat menampung anak-anak warga Jakarta dalam memperoleh kesempatan layanan pendidikan,

dan bahkan mirisnya masih terdapat di beberapa kecamatan yang padat penduduk didapati kekurangan jumlah SMP dan SMA/SMK tersebut. Fraksi Gerindra menilai selain perlunya memperbaiki gedung sekolah yang rusak, dan perlunya penambahan gedung atau ruang kelas baru bagi sekolah yang telah ada, juga harus dibangun sekolah-sekolah baru sesuai kebutuhan, luasnya daerah, serta kepadatan penduduknya. Oleh karena itulah, pada kesempatan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan P2APBD Tahun 2023 ini kembali kami mempertanyakan, khususnya mengapa kegiatan rehab berat terhadap sekolah-sekolah yang sudah tidak layak di wilayah DKI Jakarta atau yang sudah masuk dalam daftar rehab total tetapi belum juga terlaksana hingga tahun ini. Meskipun disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD (P2APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, Buku V, Lampiran VII halaman 29, dinyatakan bahwa penyelesaian proses lelang pada Belanja Modal Gedung dan bangunan yang membutuhkan waktu di antaranya, salah satunya adalah renovasi sekolah berupa 26 gedung rehab berat dan 16 gedung rehab total di Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan, sehingga ini menjadi alasan bagi realisasi Belanja Modal hanya terserap sebesar 81,63 persen. Bagi Kami memandang bahwa ini menunjukkan belum adanya perencanaan yang matang dalam penggunaan anggaran yang telah tersedia. ***Mohon Tanggapan !***

3. Terkait dengan tata kelola asset, berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, dimana Pemprov. DKI Jakarta dalam upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan

keuangan, beberapa langkah yang akan diambil di antaranya membenahan penatausahaan aset daerah melalui penertiban pencatatan dan penyempurnaan pengembangan Sistem Informasi Aset Daerah. Fraksi Gerindra menilai agar penagihan kewajiban fasos-fasum kepada pihak pengembang terus dilakukan secara massif dan aset yang telah tertagih jangan dibiarkan menjadi lahan tidur. Dalam rangka menciptakan sumber atau peningkatan pendapatan daerah fasos-fasum tersebut bisa dikerjasamakan dengan melibatkan pihak swasta yang dinilai mampu untuk pengelolaan yang lebih produktif. ***Mohon Tanggapan!***

4. Terkait dengan dengan maraknya pembangunan menara telekomunikasi atau BTS (*Base Transceiver Station*) di seluruh wilayah Jakarta, Fraksi Gerindra meminta agar aparaturn pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus serius mencermati, mengawasi serta menindak tegas perusahaan penyedia menara-menara yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang salah satunya diatur dengan ketentuan Pasal 5 Pergub No. 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, dimana Menara sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Lokasinya sesuai dengan zona menara;
 - b. Memiliki IMB Menara;
 - c. Memiliki IPPT; dan
 - d. Memiliki kehandalan konstruksi.

Fraksi Gerindra menyayangkan adanya pembiaran berdirinya tower telekomunikasi yang salah satunya dibangun sejak bulan November

2023 di atas Masjid Al-Ihsan di Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dapat berdiri tanpa izin dan berada pada zona yang dilarang. Atas kejadian tersebut Fraksi Gerindra meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pembongkaran kepada semua bangunan Menara telekomunikasi yang melanggar. ***Mohon Tanggapan!***

5. Selanjutnya yang menyangkut dengan upaya ketertiban umum di Kota Jakarta dan dalam rangka penciptaan potensi pendapatan daerah, Fraksi Gerindra meminta agar Pemprov DKI Jakarta menerbitkan aturan berupa Perkada kepada perusahaan penyelenggara transportasi online agar menyediakan shelter bagi warga pengguna jasa tersebut, karena di banyak titik wilayah menimbulkan kemacetan lalu lintas yang akut. Fraksi Gerindra meminta agar lahan atau asset milik Pemprov DKI Jakarta yang berada di sekitar titik kemacetan yang timbul akibat aktivitas pengemudi transportasi online dapat dipinjam-sewakan kepada perusahaan transportasi online untuk dibangun shelter sesuai aturan yang berlaku. ***Mohon Tanggapan!***

Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati;

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Gerindra terhadap pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung-Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dari seluruh pihak, terutama rekan-rekan anggota DPRD Provinsi DKI

Jakarta, Eksekutif, Forkopimda, Organisasi Kemasyarakatan/LSM, Wartawan, dan seluruh pemangku kepentingan masyarakat dalam proses mengantarkan pembahasan Raperda ini kami ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua, *Amin Ya Robbal Alamin.*

***Billahit-Taufik Wal hidayah, Wassalamu'alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya.***

Salam Indonesia Raya !

Jakarta, 29 Juli 2024

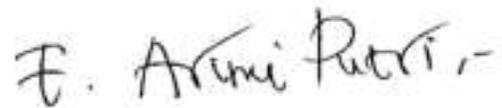
**FRAKSI PARTAI GERINDRA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,



H. Nurhasan, SE.

Sekretaris,



ESTI ARIMI PUTRI



PEMANDANGAN UMUM



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN
ANGGARAN 2023**

Disampaikan Oleh :

Ir. Ahmad Mardono, M.Si.

**FRAKSI
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P2APBD) TAHUN ANGGARAN 2023

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Yang Terhormat Para Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD DKI Jakarta;

Yang Terhormat Saudara Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

Yang Terhormat Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati;

Mengawali kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam mencermati **Pidato Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.**

Melalui kesempatan Pemandangan Umum ini, Fraksi PKS berharap bahwa di akhir masa jabatan sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 kita bisa tetap produktif dalam menjalankan amanah konstituen, menunjukkan kinerja yang baik dan terus membangun kebersamaan. Fraksi PKS juga berharap silaturahmi diantara kita juga tetap terjaga meskipun nanti diantara kita ada yang tidak lagi menjadi anggota DPRD pada periode mendatang. Pada dasarnya jabatan adalah amanah dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepada kita. Fraksi PKS juga

mengajak agar kita menjaga iklim dan suasana yang kondusif menjelang perhelatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga Jakarta tetap AMAN dan Pilkada berjalan dengan lancar.

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Fraksi PKS akan memulai pemandangan umum terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 ini dengan memberikan beberapa catatan terhadap kinerja keuangan daerah. Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah berhasil melampaui target pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD 2023. Namun secara implisit hal ini juga menunjukkan bahwa sebetulnya PAD ini masih bisa ditingkatkan lagi dan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum maksimal dibandingkan dengan potensi pendapatan daerah yang dapat dihasilkan. Bahkan Pemprov DKI Jakarta cenderung mencari aman dengan menetapkan target optimis PAD yang rendah. Padahal peluang peningkatan pajak daerah masih cukup besar dengan kebijakan *Fiscal Cadaster* dan penerapan *real time online* beberapa jenis pajak secara penuh.

Fraksi PKS juga prihatin dengan capaian retribusi daerah yang belum memenuhi target padahal target yang ditetapkan dalam APBD juga tidak terlalu besar. Bahkan target pendapatan dari Retribusi Daerah ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan target retribusi tahun-tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp 700 miliar. Masih banyak jenis retribusi yang perlu dioptimalkan seperti retribusi parkir, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. **MOHON TANGGAPAN !!**

Selanjutnya Fraksi PKS menyayangkan realisasi belanja modal yang relatif rendah (dibawah 85%) terutama realisasi belanja modal tanah yang hanya 52,8%. Pengalaman bertahun-tahun dalam melakukan belanja modal tanah harusnya sudah bisa memberikan pengalaman adanya perencanaan modal tanah yang perlu diperbaiki dan dipersiapkan dengan matang sehingga

rencana belanja modal ini dapat direalisasikan secara maksimal. **MOHON TANGGAPAN !!**

Fraksi PKS mencatat dalam pelaksanaan APBD 2023 ini masih ada penyertaan modal yang tidak terealisasi dengan nilai cukup besar yaitu Rp. 585 miliar. Perlu ada penjelasan mengapa penyertaan modal ini tidak dapat direalisasikan. Sementara pada sisi belanja juga terdapat realisasi belanja pegawai yang hanya 95%. Ada sekitar Rp. 800 miliar belanja pegawai yang tidak terserap. Apakah ini terkait dengan lambatnya pembaharuan data kepegawaian sehingga banyak pegawai baik ASN maupun PJLP yang sudah meninggal dunia, pensiun tapi namanya masih terdaftar dan masih dibayarkan berbagai tunjangannya maupun jaminan sosialnya. **MOHON TANGGAPAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Pada tataran pelaksanaan teknis di lapangan, Fraksi PKS juga memberikan catatan terhadap pelaksanaan APBD 2023 ini. **Pertama**, Fraksi PKS prihatin dengan buruknya pelayanan pangan bersubsidi bagi penerima KPJ karena hanya dipusatkan di Kecamatan dengan stok yang terbatas. Akibatnya masyarakat penerima KJP Plus yang ingin menebus pangan bersubsidi harus antri bahkan sejak jam 3 dan berakibat munculnya praktek calo antrian. Hal ini tentu sangat tidak manusiawi dan tidak seharusnya terjadi di kota besar dengan fasilitas dan anggaran besar seperti Jakarta. Penerima bantuan pangan ini juga manusia yang terlapor harus dihormati hak-haknya dan tidak layak diperlakukan demikian. **MOHON TANGGAPAN !!**

Kedua, Fraksi PKS mengkritik kebijakan PJ Gubernur pada tahun lalu yang tidak pro pesepeda dengan dihapuskannya anggaran bagi jalur sepeda. Bahkan Pemprov DKI Jakarta juga menghapus sebagian jalur sepeda di Jl. Wolter Monginsidi (Pasar Santa) yang kemudian digunakan untuk jalur kendaraan bermotor. Hal ini berakibat kemacetan yang tambah parah di

kawasan tersebut. Padahal kita selama ini mengkampanyekan pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong penggunaan moda transportasi yang lebih sehat dan mengurangi polusi seperti pesepeda. Kebijakan menghentikan pengembangan jalur pesepeda merupakan langkah mundur, pada saat beberapa daerah lain justru mencontoh DKI Jakarta yang membuat jalur bersepeda di jalan raya. **MOHON TANGGAPAN !!**

Ketiga, Fraksi PKS mempertanyakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang seperti jalan ditempat. Masih banyak warga yang program sertifikasi tanahnya tidak berlanjut padahal Pemda DKI menjanjikan akan berlangsung sampai tuntas. Sementara mereka sudah menyerahkan berkas-berkas tanahnya dan seringkali kesulitan menanyakan status berkas-berkas tersebut. Bahkan ada warga yang masih dikenakan biaya meskipun untuk program ini sudah dianggarkan dalam APBD. Padahal juga Pemprov DKI Jakarta pernah menjanjikan di 2023 seluruh bidang tanah di Jakarta sudah tersertifikasi. Ada masalah koordinasi yang kurang baik antara Kanwil BPN DKI Jakarta dengan Pemprov DKI sehingga tidak jelas progress dari program ini. Demikian juga antara apa yang dipersepsikan masyarakat terhadap program ini dengan apa yang sudah dicapai oleh BPN Jakarta. Oleh karena itu program ini sebaiknya dilanjutkan, tidak berhenti sampai dengan pengukuran tanah saja (sementara masyarakat mempersepsikan sampai keluarnya sertifikat). **MOHON TANGGAPAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Catatan **Keempat**, Fraksi PKS prihatin dengan kebijakan pendataan KJP Plus dan KJMU yang semrawut dan lemah koordinasi. Akibatnya banyak penerima KJP Plus dan KJMU yang hilang namanya dari daftar penerima. Koordinasi data antar instansi tidak berjalan dengan baik dan kurang sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat banyak yang terkejut saat namanya hilang dari daftar penerima KJP Plus dan KJMU. Apalagi Pemprov

DKI Jakarta juga melakukan pengurangan anggaran pada hampir semua program bantuan sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ), subsidi pangan bagi keluarga tidak mampu dan anggaran yang sifatnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Padahal masih banyak masyarakat kecil yang ekonominya belum lagi bangkit setelah diterpa pandemi Covid-19. **MOHON TANGGAPAN !!**

Kelima, Kebijakan PJ Gubernur yang mengurangi secara signifikan jumlah titik penyediaan jaringan WiFi untuk masyarakat (Jak wifi) dalam APBD 2023 sangat disayangkan. Mengingat penyediaan Jak Wifi ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk berbagai kebutuhan. Banyak masyarakat yang mengeluhkan dihilangkannya Jak Wifi karena dibutuhkan untuk mengakses berbagai informasi, pendidikan maupun menunjang usaha kecil mereka. Meskipun ada beberapa titik yang dipulihkan melalui dukungan CSR perusahaan, namun jumlah yang dihilangkan cukup banyak. Oleh karena itu Fraksi PKS meminta agar dilakukan upaya-upaya maksimal untuk menambah kembali layanan Jak Wifi. Kalaupun masih ada hal-hal yang negatif dari penyediaan layanan Jak Wifi ini, harusnya diperbaiki secara sistem, bukan dengan mengurangi layanan yang dibutuhkan masyarakat ini. **MOHON TANGGAPAN !!**

Keenam, Fraksi PKS mempertanyakan pengurangan subsidi dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) untuk PT Transjakarta. Hal ini menunjukkan kurang berpihaknya Pemprov DKI Jakarta terhadap transportasi publik yang juga berperan dalam mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi udara. Fraksi PKS mengingatkan bahwa pengurangan subsidi ini berpotensi mengurangi layanan bus Transjakarta. Mengorbankan PSO Transjakarta untuk mengurangi defisit APBD adalah hal yang kurang tepat. Masih banyak pos lain yang bisa dilakukan efisiensi daripada mengorbankan layanan transportasi publik yang banyak digunakan masyarakat untuk aktifitas produktif nya. **MOHON TANGGAPAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Ketujuh, Fraksi PKS meminta dilakukan evaluasi atas kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang me-non-aktifkan peserta BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan Pemprov DKI Jakarta (PBI) tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Banyak masyarakat terkejut ketika tidak bisa menggunakan BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena kepesertaannya dinon-aktifkan pada tahun 2023 lalu. Masyarakat bisa mengaktifkan kembali selama bisa menunjukkan domisilinya masih di Jakarta dan ber-KTP Jakarta. Padahal kebijakan pe-non-aktifan NIK bagi warga ber-KTP Jakarta yang tidak lagi tinggal di Jakarta baru dilakukan di 2024 dan ditahap awal baru dilakukan untuk warga ber-KTP Jakarta yang sudah meninggal. Hal ini sangat merepotkan masyarakat dan menyebabkan masyarakat yang BPJS Kesehatan nya non-aktif, harus membayar sendiri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Bukankah peserta BPJS PBI ini dari keluarga tidak mampu dan Pemprov DKI Jakarta juga sudah berkomitmen untuk mencapai 100% Universal Health Coverage (UHC) bagi warga Jakarta ? **MOHON TANGGAPAN!!**

Kedelapan, Fraksi PKS menilai program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi pencemaran udara dengan melakukan uji emisi kendaraan bermotor secara masif, razia uji emisi, menyiram jalan, sampai menyemprotkan air dari atas gedung pencakar langit. tidak serius dalam realisasinya. Fraksi PKS menilai kebijakan tersebut tidak dilakukan secara matang sehingga dalam penerapannya tidak konsisten. Selain itu upaya yang dilakukan tersebut bersifat responsif, tidak strategis, dan tidak berlandaskan bukti ilmiah. Dengan kata lain tidak ada kebijakan dan program yang serius dalam mengatasi polusi udara. Sebaliknya program yang baik untuk mengurangi pencemaran udara seperti jalur pesepeda dan peningkatan

layanan transportasi publik justru dikurangi anggarannya dalam pelaksanaan APBD 2023. **MOHON TANGGAPAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Kami berharap butir-butir penting dan catatan yang kami sampaikan dalam Pemandangan Umum ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari Gubernur dan jajarannya.

*Wallaahu muwaffiq ila aqwaamithoriaq, Fastabiqul khairat
Billaahi-taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Jakarta, 29 Juli 2024

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Wakil Ketua,



H. Ismail, S.Pd., M.H.

Sekretaris,



Drs. H. M. Taufik Zoelkifli, MM



PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

TERHADAP

**PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD (P2APBD) TAHUN
ANGGARAN 2023**

Disampaikan Oleh :

Wita Susilowati, S.Ikom,.M.Kom

Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta

**PADA RAPAT PARIPURNA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

29 JULI 2024

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN 2023**

**Disampaikan oleh : Wita Susilowaty, S.I.Kom, M.Kom
Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta**

*Bismillahi rahmannirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua, syalom
Om Swastiastu, Namu Buddhaya
Salam Kebajikan*

- Yth. Sdr. Ketua, Para Wakil Ketua dan Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Bapak Heru Budi Hartono, Pejabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Para Anggota Dewan Perwakilan Daerah - Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Para Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Para Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah dan para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan seluruh hadirin yang kami hormati.

Mengawali pandangan umum fraksi kami, sebagai umat yang beragama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga sebagai pengemban amanah rakyat, kita dapat menjalankan tugas konstitusional anggota DPRD untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi-

Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Sebagai partai yang bergerak dan berjuang dalam mengupayakan perubahan dan perbaikan, Fraksi Partai Demokrat akan senantiasa mengawal kinerja Pemprov DKI Jakarta, termasuk mengevaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2023 agar uang dari rakyat dapat dipergunakan secara efektif, efisien serta dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta.

Dalam kesempatan ini, Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada Saudara PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono, beserta seluruh jajarannya yang telah berhasil untuk ke-7 kalinya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun anggaran 2023.

Fraksi Partai Demokrat berharap agar predikat tersebut dapat terus dipertahankan, tapi yang lebih penting lagi adalah predikat WTP dapat selalu berkorelasi dengan peningkatan kinerja pembangunan karena pada dasarnya APBD merupakan instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan.

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Memperhatikan pengelolaan APBD TA 2023, Fraksi Partai Demokrat secara umum berpandangan bahwa di bawah kepemimpinan Bapak PJ Gubernur pengelolaan APBD mulai dilakukan secara prudent (bijaksana), transparan dan akuntabel. Besar harapan kami agar sikap

Fraksi Partai Demokrat berharap ke depannya, Daerah Khusus Jakarta memiliki postur APBD yang semakin berkualitas, di mana APBD dapat lebih dioptimalkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan krusial

warga Jakarta serta mendukung terlaksananya transformasi Jakarta sebagai kota global.

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Suatu pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah harus dapat menjelaskan sejauh mana pemanfaatan dana publik untuk memenuhi berbagai tujuan pembangunan.

Terkait dengan materi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, Fraksi Partai Demokrat memberikan pandangan sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2023 dapat terealisasi sebesar Rp71,06 triliun atau sebesar 100,57%. Apabila dibandingkan dengan realisasi APBD 2022 sebesar Rp67,29 triliun maka terjadi kenaikan sebesar 5,61%.

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melebihi target yang diharapkan. Dari target sebesar Rp48,42 triliun, Pemerintah telah merealisasikannya sebesar Rp49,13 triliun atau 101,44%. Jika dibandingkan dengan realisasi 2022 maka terdapat kenaikan sebesar 7,74%.

Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp43 Triliun, dapat direalisasikan sebesar 101,20% atau Rp43,51 Triliun.

Rincian Pajak Daerah dengan realisasi di atas 100% yakni :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp9,41 Triliun (103,48%),
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp6,64 Triliun (106,30%),

- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp1,68 Triliun (105,05%),
- 4) Pajak Hotel sebesar Rp1,86 Triliun (118,68%),
- 5) Pajak Restoran sebesar Rp3,94 Triliun (103,93%),
- 6) Pajak Hiburan sebesar Rp686 Miliar (114,44%),
- 7) Pajak Reklame sebesar Rp975 Miliar (108,42%),
- 8) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp889 Miliar (111,19%),
- 9) Pajak Parkir sebesar Rp477 Miliar (106,07%),
- 10) Pajak Air Tanah sebesar Rp83 Miliar (119,60%),
- 11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp9,04 Triliun (100,54%),

Sedangkan Pajak Daerah dengan realisasi kurang dari 100% yaitu:

- 1) Pajak Rokok Rp855 Miliar (97,19%),
- 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp6,91 Triliun (86,92%).

Terhadap realisasi penerimaan Pajak Daerah tersebut, Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai catatan, Fraksi Partai Demokrat meminta agar Badan Pendapatan Daerah terus memperbaiki perencanaan penerimaan atas pajak daerah. Selain itu, Fraksi Partai Demokrat berharap dengan terbitnya Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka penerimaan Pajak Daerah dapat lebih ditingkatkan lagi.

2. Terkait dengan realisasi dari Retribusi Daerah, Fraksi Partai Demokrat menyoroti Retribusi Perizinan Tertentu yang tidak mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar Rp273 Miliar, di mana retribusi tersebut hanya dapat terealisasi sebesar Rp236 Miliar atau 86,51%. **Mohon penjelasan!**

3. Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan atas rendahnya realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Tahun Anggaran 2023, terutama pendapatan dari: Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan (28,64%) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah (35,69%) dan Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan (18,48%), yang jauh dari Target yang telah ditetapkan. **Mohon Penjelasan!**

4. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan atas Belanja Modal yang hanya terealisasi sebesar 81,63% dari anggaran sebesar Rp10,85 triliun. Terkait dengan hal tersebut, Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan lebih lanjut atas beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Tidak terealisasinya pengadaan tanah jalan karena masih dalam proses penunjukan Lokasi di Dinas Bina Marga.
 - 2) Pembebasan lahan pada Dinas Sumber Daya Air.
 - 3) Pembangunan Gelanggang Remaja di Kecamatan Jakarta Selatan; Pembangunan Rusun dan Kawasan Permukiman serta renovasi sekolah (26 rehab berat dan 16 rehab total).
 - 4) Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai dan infrastruktur pengendali banjir pesisir Pantai.
 - 5) Pembangunan/Rehabilitasi Sub polder Marunda dan pompa Tipala Adhiyaksa.

5. Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan mengenai progress Pembangunan RDF yang direncanakan akan beroperasi pada awal tahun 2025. Mengingat bahwa timbulan sampah di DK Jakarta pada tahun 2022 telah mencapai lebih dari 3.1 juta ton/tahun atau 8.527 ton per hari sehingga perlu dilakukan percepatan Pembangunan FPSA Makro maupun FPSA Mikro. **Mohon tanggapan!**

6. Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil menerima kewajiban SIPPT/IPPR dengan total jumlah Berita Acara Serah Terima (BAST) sebanyak 84 BAST dengan nilai total Rp23,91 Triliun. Namun masih terdapat aset-aset dari kewajiban

pengembang yang ditunda penyerahan karena aset-aset tersebut dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang merugikan Pemprov dan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Fraksi Demokrat meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih tegas dalam melakukan penagihan kewajiban pengembang dengan mengenakan sanksi yang tegas bagi pengembang yang belum melakukan penyerahan kewajiban Pemegang SIPPT/IPPR dengan tidak menerbitkan izin-izin yang diperlukan dalam kegiatan usahanya.

7. Fraksi Partai Demokrat meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih fokus lagi melakukan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dengan sasaran yang ditetapkan berdasarkan Kepgub Nomor 665 Tahun 2023 yakni sebanyak 49.667 Keluarga dan 228.667 Individu.
8. Terkait dengan penanganan stunting, Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan pendekatan yang lebih komprehensif bukan hanya melalui perbaikan asupan gizi melainkan juga melakukan perbaikan lingkungan tempat tinggal seperti penyediaan air bersih dan sanitasi yang baik.
9. Terkait dengan pemberian hibah kepada Instansi Vertikal, Fraksi Partai Demokrat meminta agar Pemprov mempersiapkan konsep yang jelas dalam menilai kemanfaatan pemberian Hibah tersebut bagi Pemprov dan warga Jakarta.
10. Terkait dengan Belanja Subsidi, pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp5.9 triliun dengan Realisasi Belanja Subsidi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.53 triliun atau 93,76%. Fraksi Partai Demokrat secara khusus menyoroti PSO Subsidi Transportasi, Belanja subsidi dalam bidang transportasi dianggarkan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.84 triliun dan terealisasi sebesar Rp4.49 triliun atau 92,82%, terhadap hal tersebut Fraksi Partai Demokrat memberikan pandangan dan catatan sebagai berikut:

- a) Masih banyak angkutan umum regular yang belum terserap oleh Program Jaklingko dengan sehingga masih menyebabkan banyak kemacetan di beberapa ruas jalan Jakarta.
 - b) Subsidi transportasi melalui PSO yang dikelola oleh transjakarta harus dikelola secara lebih efisien karena pada kenyataannya, efisiensi yang dilakukan Transjakarta selama ini kurang tepat sasaran, mengingat sebagian besar efisiensi hanya mengurangi nilai investasi dan kontrak mitra operator JakLingko yang berpotensi besar menurunkan kualitas layanan, khususnya untuk Mikrotrans.
 - c) Transjakarta sebagai pengelola PSO Subsidi Transportasi harus bertindak adil kepada seluruh mitra operator program Jaklingko agar cakupan area layanan lebih merata di seluruh wilayah Jakarta dan tidak menimbulkan konflik di antara mitra operator agar tidak mempengaruhi kualitas layanan transportasi untuk warga Jakarta.
11. Terkait dengan Penyertaan Modal Daerah (PMD) bagi BUMD pada tahun 2023 sebesar Rp4,83 triliun atau 88,99% dari anggaran sebesar Rp5.43 triliun, Fraksi Partai Demokrat memberikan pandangan dan catatan sebagai berikut:
- a) PMD yang peruntukannya belum terserap agar dapat dikembalikan ke Kas Daerah dan jika ternyata masih dibutuhkan maka dapat diajukan kembali oleh BUMD terkait dalam periode berikutnya. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan dana PMD dipergunakan di luar peruntukannya karena pada hakikatnya PMD merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada rakyat.
 - b) Dalam hal pengelolaan Aset BUMD, BP-BUMD agar secara aktif melakukan pendataan aset-aset BUMD agar jelas peruntukannya dalam rangka meningkatkan kontribusi PAD kepada Pemprov DKI Jakarta dan kemaslahatan warga Jakarta.

- c) BP-BUMD agar memastikan terciptanya sinergitas BUMD dalam pelaksanaan usaha agar dapat saling mendukung dan menggarap potensi bisnis bersama serta terkoneksi dalam satu ekosistem sehingga ekosistem BUMD DKI Jakarta dapat berkembang lebih luas sehingga memberikan manfaat bagi warga Jakarta.
 - d) BP-BUMD perlu memantau seluruh Rencana Bisnis Jangka Panjang, Menengah, dan termasuk RKA Tahunan BUMD agar seluruh aktivitas BUMD dapat terpantau dan dievaluasi secara terus menerus dalam rangka menjaga implementasi GCG dan Manajemen Risiko di seluruh BUMD.
 - e) BP-BUMD agar segera melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh penugasan Pemprov DKI Jakarta untuk mengetahui apakah bahwa penugasan tersebut telah sesuai dengan tujuan penugasan antara lain: Pengelolaan pulau-pulau Teluk Jakarta yang sudah terbangun; penyediaan transportasi publik terintegrasi/Jaklingko, penyediaan hunian terjangkau/DP Nol Rupiah; SJUT, Pengolahan Sampah dan lain-lain.
12. Terhadap keberadaan pasar tradisional yang mulai ditinggalkan masyarakat, Fraksi Partai Demokrat meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Perumda Pasar Jaya segera merevitalisasi pasar tradisional yang ada, di mana revitalisasi yang dilakukan bukan hanya terbatas pada aspek perbaikan fisik melainkan juga menciptakan lingkungan pasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta memenuhi standar kota global. **Mohon tanggapan!**
13. **Dalam rangka** mendukung kegiatan dan pengembangan kehidupan kesenian di wilayah Propinsi DKI Jakarta. Fraksi Partai Demokrat mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan dukungan anggaran yang diperlukan oleh Dewan Kesenian Jakarta.

Selain itu, dalam pengelolaan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM) agar segera dilakukan pembenahan terhadap

tata kelola kawasan yang baik, transparan dan memiliki keberpihakan kepada pemangku kepentingan PKJ TIM, terutama para pegiat seni budaya.

14. Terkait dengan pelaksanaan pemadanan data penerima KJP yang diseleksi berdasarkan DTKS dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang menyebabkan banyaknya keluhan oleh warga terdampak. Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa penerima bansos harusnya warga yang sesuai kriteria, namun demikian proses verifikasi yang dilakukan harus dipastikan akurat sehingga tidak merugikan warga Jakarta yang berhak mendapatkan bantuan sosial tersebut.

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Demikianlah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.

Kami berharap pertanyaan, pandangan, saran, dan kritik yang kami sampaikan dapat mendapatkan tanggapan dan penjelasan dari Pihak eksekutif.

Akhirnya, atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat, kami ucapkan terima kasih.

*Jalan pagi ke daerah Kramat
Beli kemeja di Salemba Bluntas
Heru Budi bukannya sedang berhemat
Tapi bekerja menjadikan APBD lebih berkualitas*

Demokrat bersama rakyat! Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat!

Billahi-taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 29 Juli 2024
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua,



Desie Christhyana Sari, SE,M.KOM

Sekretaris,



H. Ali Muhammad Johan, C, SE,MH



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023****

Disampaikan oleh: Syahroni, SE
Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 29 Juli 2024

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Disampaikan oleh: Syahroni, SE

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Salam sejahtera bagi kita semua.

- Yth, - Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Sdr. Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya;
 - Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta (**Forkopimda**);
 - Rekan-rekan Anggota Dewan, serta Hadirin dan undangan yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali keadaan sehat wal afiat, dalam rangka Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk mendengarkan penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2023.

Saudara Pimpinan Rapat, Pj.Gubernur, Rekan-rekan dan hadirin yang kami hormati,

Kami Fraksi PAN memberikan apresiasi atas kinerja yang optimal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp.71,07 T (tujuh puluh satu koma tujuh triliun rupiah) atau 100,57% (seratus koma lima puluh tujuh persen) dari target. Atas pencapaiannya tersebut menandakan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja optimal ditengah situasi ekonomi global yang tidak stabil.

Saudara Pimpinan Rapat, Pj.Gubernur, Rekan-rekan dan Hadirin yang terhormat .

Pada pembahasan yang kami lakukan di Internal Fraksi PAN ada beberapa catatan penting yang sepatutnya menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera dapat merespon dan memberikan penyelesaian yang cepat dan akurat. Adapun beberapa catatan yang kami fokuskan antara lain :

1. Kami menyoroti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 sebesar Rp. 6,54 T (enam koma lima puluh empat triliun rupiah), kami melihat masih adanya perencanaan program yang disusun belum sepenuhnya mempertimbangkan informasi, data dan fakta. Sehingga, berakibat pada perencanaan yang buruk. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi pengendalian anggaran. Peran Pemerintah Daerah adalah menarik anggaran non APBD, baik dalam bentuk anggaran Pemerintah Pusat, anggaran Pemerintah Provinsi, anggaran yang bersifat program *non government* dan sebagainya. Sehingga peran optimal tersebut dapat menekan defisit anggaran. **Mohon tanggapannya...**
2. Pengelolaan Aset masih menjadi kelemahan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penerapan prinsip *good governance* diantaranya melakukan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar aset-aset yang ada dapat dikelola secara optimal. Pada kasus

Rusunawa Marunda adanya permasalahan yang terjadi mulai dari bangunan yang terbengkalai, kurangnya perawatan dan pemeliharaan, sehingga menjadi bangunan yang tidak layak huni hingga adanya pencurian aset. Kami sangat menyayangkan kondisi Rusunawa Marunda saat ini, padahal warga yang dulu bertempat tinggal disana merasa senang karena merupakan warga relokasi dari daerah rawan banjir. Kami Fraksi PAN ingin meminta penjelasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait status dari Rusunawa Marunda dan bagaimana mengenai audit perhitungan aset bernilai yang ada di Rusunawa Marunda..? **Mohon Penjelasannya...**

3. Fraksi PAN juga menyoroti beberapa hal terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal masalah operasional dari sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di DKI Jakarta, diantaranya Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Seperti yang ada dalam Ikhtiar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2023 yang dirilis BPK. Temuan masalah yang menjadi catatan BPK adalah pembangunan Jakarta Internasional Stadium (JIS) oleh PT. Jakpro dan terkait pembatalan pembelian tanah oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang berlokasi di Ujung Menteng dan Kampung Malaka Rorotan. Atas permasalahan tersebut BPK memberikan catatan kepada Jakpro dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, diantaranya Jakpro direkomendasikan untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp. 65,63 M (enam puluh lima koma enam puluh tiga miliar rupiah) kepada rekanan dan menyetorkannya ke rekening proyek JIS dan merekomendasikan kepada Jakpro mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 7, 26 M (tujuh koma dua puluh enam miliar rupiah) kepada rekanan. Sedangkan kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya direkomendasikan untuk menagih piutang, pendapatan denda dan bunga keterlambatan yang belum diterima, uang pengganti tanah, serta pengembalian uang muka sesuai nominal dari masing-masing pihak ketiga. Kami Fraksi PAN melihat bahwa BUMD belum menerapkan

prinsip-prinsip *good corporate governance*. Kami **mohon tanggapannya...**

4. Fraksi PAN menyoroti kembali atas kondisi pengangguran yang ada di DKI Jakarta saat ini masih berada di angka 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu), walau pun saat ini Pemerintah DKI Jakarta telah mengatakan adanya penurunan angka pengangguran sebanyak 22.800 (dua puluh dua ribu delapan ratus) orang atau 0,65 % (nol koma enam puluh lima persen) pada tahun 2023. Namun, perlu menjadi catatan bahwa yang mendominasi lapangan pekerjaan adalah di sektor perdagangan sebagai sektor terbesar yang menampung tenaga kerja. Sementara pekerjaan di sektor aktivitas profesional dan perusahaan menurun. Fraksi PAN konsisten menyuarakan bahwa dalam hal permasalahan pengangguran dapat diatasi dengan memaksimalkan *link and match*. Kami meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk serius dalam meningkatkan keselarasan aspek penyelenggaraan pendidikan vokasi antara SMK dengan dunia kerja untuk mengurangi pengangguran. Sangat disayangkan bila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang mengoptimalkan kegiatan yang berbasis teknologi digital. Salah satunya pelatihan kerja yang terbilang masih ketinggalan zaman. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat lebih serius dalam mengatasi pengangguran dengan membuat sebuah target pencapaian yang konkret sekian persen pertahunnya dalam upaya penyelesaian pengangguran di Jakarta. **Mohon Tanggapannya...**
5. Pendidikan merupakan kewajiban Pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa sesuai dengan UUD 1945 oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak sekolah. Pendidikan gratis bukanlah hanya sebuah wacana tapi juga harus dapat segera direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pendidikan gratis menjadi penyelesaian tidak ada lagi anak yang putus sekolah di Jakarta karena masalah biaya pendidikan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mereka menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang SMA tanpa adanya

beban. Sekolah gratis baik di negeri maupun swasta dari TK hingga jenjang SMA. Selain itu, bagi Mahasiswa kurang mampu dan memiliki KTP Jakarta dipermudah dalam mengajukan bantuan sosial biaya pendidikan jenjang Perguruan Tinggi dengan nominal yang disesuaikan. Kami Fraksi PAN berharap agar dapat segera dilakukan kajian bersama para *stakeholders* mengenai realisasi program pendidikan gratis di Jakarta.

Saudara Pimpinan Rapat, Pj.Gubernur, Rekan-rekan dan Hadirin yang terhormat,

Demikian pandangan umum Fraksi PAN terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.

Pada akhirnya, kepada saudara Pimpinan Rapat, saudara Pj.Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan rekan-rekan Anggota Dewan, serta hadirin sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabarannya dalam mendengarkan Pemandangan Umum ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala langkah dan perbuatan kita. Amiin.

Wabillahittaufiq wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wabillahit-taufiq walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

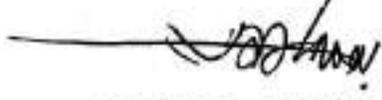
Jakarta, 29 Juli 2024

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua,

Sekretaris,


DR. H. BAMBANG KUSUMANTO, M.Sc


OMAN R. RAKINDA, S.IP, M.SI



Pandangan Umum Fraksi Partai Solidaritas Indonesia

Terhadap

**Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023**

dibacakan oleh:

Cornelis Hotman

**Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta
Senin, 29 Juli 2024**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Shalom, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.
Om Swastiastu.
Namo Buddhaya.
Salam Kebajikan.

Yang terhormat,
Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta,
PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Beserta Jajarannya,
Serta Para Anggota DPRD Provinsi Jakarta Yang Kami Banggakan.

Salam Solidaritas!

Hadirin Sekalian yang Kami Hormati,

Sebelum saya membacakan pandangan umum ini, izinkan kami untuk mengucapkan mengucapkan selamat Hari Anak Nasional, yang jatuh pada 23 Juli 2024 kemarin. Semoga Jakarta bisa menjadi kiblat kota yang ramah anak dan semoga tidak ada lagi kekerasan terhadap anak dimanapun mereka berada. Anak-anak layak untuk tumbuh dengan bahagia!

Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Ijinkan saya, mewakili *bro-sis* anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (F-PSI), untuk menyampaikan pandangan umum kami terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Untuk mengawali pandangan umum ini, kami menyayangkan mundurnya jadwal penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2023 untuk Provinsi DKI Jakarta, sehingga kami di pihak DPRD baru menerima laporan tersebut 1 hari kerja sebelum pembacaan PU hari ini, hal ini menyebabkan analisis kami terhadap LHP BPK menjadi tergesa-gesa dan menjadi kurang maksimal.

Mohon Tanggapan.

Terkait pelaksanaan APBD DKI Jakarta TA 2023, pada kesempatan ini kami berterimakasih atas kinerja Pemerintahan DKI Jakarta pada TA 2023 untuk

ketercapaiannya pada realisasi pendapatan yang lebih tinggi dari target, realisasi penyerapan untuk program-program yang relatif optimal, serta tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang capaiannya di atas target nasional.

a. Ketercapaian Pendapatan Daerah yang realisasinya hingga 100,57%

Fraksi PSI mengapresiasi kinerja Pemprov DKI yang telah mampu memenuhi target penerimaan daerah sehingga dapat berkontribusi pada kesejahteraan warga DKI Jakarta. Jika dibandingkan dengan penerimaan pada TA 2022, terdapat kenaikan pada realisasi pendapatan dari Rp 67,29 triliun menjadi Rp 71,06 triliun. Kami juga mengapresiasi atas naiknya retribusi dari pendapatan BLUD yang naik dari Rp 3,25 triliun menjadi Rp 3,47 triliun serta naiknya penerimaan dividen dari BUMD hingga 36% dibandingkan periode 2022 atau naik dari Rp 390 miliar di 2022 menjadi Rp 531 miliar.

Kenaikan yang bersumber dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah termasuk dari naiknya realisasi Pendapatan Pajak Daerah, retribusi dari BLUD, serta dividen BUMD ini kami nilai sebagai pencapaian. Sebab Pemprov DKI Jakarta dapat memanfaatkan momentum bangkitnya perekonomian DKI Jakarta pasca Covid-19 yang disertai dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta BLUD dan BUMD yang semakin produktif sehingga mampu berkontribusi pada pendapatan DKI Jakarta.

Mohon Tanggapan.

b. Realisasi Belanja yang semakin optimal dan terencana

Atas penyerapan Belanja Daerah dengan realisasi mencapai 92,55%, terutama pada belanja operasi yang realisasinya mencapai 95,32%. Fraksi PSI menilai ini sebagai sebuah capaian realisasi belanja yang semakin optimal dan terencana. Apalagi jika dibandingkan realisasi belanja pada periode sebelumnya yaitu TA 2022 yang realisasi Belanja dan Transfer hanya mencapai 84,27%.

Mohon Tanggapan.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK di atas Target Nasional

Dalam kesempatan ini juga kami berterima kasih pada pihak eksekutif dan SKPD atas kinerjanya yang telah melakukan tindak lanjut 71,69% dari jumlah rekomendasi (309 dari 431 rekomendasi) dengan capaian yang telah sesuai rekomendasi mencapai 30,6% (132 rekomendasi). Kami juga mengapresiasi Pemprov DKI yang telah menindaklanjuti 8.188 rekomendasi dari 9.344 rekomendasi dari 2005-2023, sehingga kinerja ini telah melebihi target nasional

penyelesaian tindak lanjut yang ditetapkan 75%. Namun demikian, kami harap Pemprov DKI dapat segera menyelesaikan PR-PR rekomendasi yang belum selesai serta yang belum ditindaklanjuti. Selain itu kami harap, dalam penyelesaian tindak lanjut Pemprov DKI tidak hanya berpaku pada kepatutan administrasi, namun juga dapat melakukan penyelesaian yang lebih substantif sehingga tidak merugikan masyarakat yang terdampak, sebagaimana pada kasus *cleansing data* guru honorer.

Mohon Tanggapan.

Atas capaian-capaian tersebut kami harap Pemprov DKI Jakarta tetap dapat memberikan kinerja terbaiknya pada periode-periode mendatang. Namun, kami juga memiliki beberapa catatan sebagai masukan pada Pemprov DKI Jakarta terkait pelaksanaan APBD TA 2023. Catatan-catatan tersebut antara lain:

1. Rendahnya hasil pemanfaatan BMD dan Temuan BPK atas Pengelolaan Pemanfaatan BMD

Kami sangat menyayangkan kinerja Pemprov DKI terkait pengelolaan aset daerah yang juga tercermin dari rendahnya pendapatan dari pemanfaatan Barang Milik Daerah. Isu rendahnya pendapatan dari pemanfaatan BMD menjadi perhatian khusus bagi Fraksi PSI dan selalu kami sampaikan setiap tahunnya. Apalagi pada periode 2023, terjadi penurunan yang signifikan dari pendapatan pemanfaatan BMD, yang pada TA 2022 mencapai Rp 253 miliar, namun pada TA 2023 hanya mencapai Rp 94,8 miliar dan hanya mencapai 28,64%. Kami sangat menyayangkan hal ini, sebab kami yakin potensi dari pendapatan sektor ini cukup besar mengingat tingginya nilai aset yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Saat ini nilai aset tanah DKI Jakarta mencapai Rp 518 triliun dan aset gedung dan bangunan mencapai Rp 46,8 triliun, dengan nilai aset yang dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan BMD atau aset dengan kategori kemitraan dengan pihak ketiga nominalnya sebesar Rp 6,52 triliun, atau realisasi hasil pemanfaatan BMD hanya 1,45% dari aset kemitraan dengan pihak ketiga. Penurunan ini sangat jauh dibandingkan periode lalu yang nilai hasil pemanfaatan BMD mencapai hampir 5% dari nilai aset kategori kemitraan.

Mohon Tanggapan

Isu terkait pendapatan dari hasil pemanfaat BMD ini pun turut menjadi temuan BPK, yang turut menjadi catatan khusus dari BPK terkait pengelolaan keuangan DKI Jakarta. Hal seolah menjadi cerminan atas kurangnya perhatian Pemprov DKI Jakarta dalam pemanfaatan aset daerah. BPK menyebutkan bahwa masih adanya isu belum

diterimanya pendapatan atas pemanfaatan BMD senilai Rp 58,9 miliar, denda Keterlambatan Minimal senilai Rp 5,54 miliar, dan potensi pendapatan minimal senilai Rp 30,97 miliar yang belum didukung perjanjian kerja sama. Beberapa dari temuan BPK atas isu di atas antara lain;

- a. Belum diterimanya pendapatan atas pemanfaatan BMD senilai Rp 54 miliar dengan dengan keterlambatan minimal senilai Rp 5,539 miliar, yang justru dilakukan oleh BUMD yaitu Jakpro dan Bank DKI.
 - i. sewa lahan pembangunan ITF oleh PT Jakpro sebesar Rp1.459.689.055,50 beserta denda keterlambatan minimal sebesar Rp267.123.097,16.
 - ii. Pemprov juga belum menerima pendapatan dari PT Bank DKI sebesar Rp50.000.000.000,00 atas objek sewa berupa ATM, kantor, dan vending machine.
 - iii. Belum diterimanya pendapatan dari PT AAP dan PT PG terkait perjanjian kerja sama beserta denda sewa yang belum tertagih untuk pembangunan SPBG sebesar Rp5.169.532.587,00. Selain itu, kedua perusahaan belum membayar piutang sebesar Rp1.665.566.778,00 sehingga total yang harus dibayarkan adalah Rp6.835.009.364,00
- b. Hilangnya pendapatan sewa atas penggunaan lahan kosong sebesar Rp13.216.800.000,00 oleh BLUD UPK PPUKMP Pulogadung karena ketiadaan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga selama lima tahun sejak tahun 2018. Berdasarkan Kepgub Nomor 92 Tahun 2023, biaya sewa per m² untuk lahan kosong adalah Rp10.000,00 per bulan. Dalam konteks ini, BLUD UPK PPUKMP kehilangan Rp13.216.800.000,00 karena permasalahan terjadi di lahan seluas 22.028 m² selama lima tahun atau 60 bulan. Fraksi PSI menyoroti perlunya ketegasan untuk membentuk perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan agar BLUD UPK PPUKMP memperoleh pendapatan atas sewa dari pihak ketiga yang hasilnya dapat dimasukkan ke dalam Kas Daerah dan dimanfaatkan untuk program lain.
- c. Hilangnya pendapatan sewa atas pemanfaatan aset sebesar Rp6.426.467.836,00 dari mitra kerja sama yang pada perjanjian kerja sama tidak mengatur klausul "pembayaran dalam proses perpanjangan sebagai bentuk piutang" dan piutang yang belum tercatat. Adapun angka tersebut adalah akumulasi dari piutang 18 mitra yang belum diakui sebesar Rp4.807.361.169,00 dan Rp1.619.106.667,00 dari 14 mitra yang yang tidak mengatur pembayaran dalam proses perpanjangan sewa.

Mohon Tanggapan

2. Tata Kelola Aset yang Masih Bermasalah

Sebagaimana yang selalu kami sampaikan, Fraksi PSI menyayangkan tata kelola aset DKI Jakarta yang kerap bermasalah. Pada periode 2023, Pemprov DKI Jakarta kembali memiliki catatan dari BPK terkait pengelolaan aset yakni pencatatan aset di tiga lokasi SIPPT senilai Rp 476,86 miliar yang belum menggambarkan nilai sebenarnya dan pencatatan bidang tanah seluas 460.725m² belum seluruhnya didukung BAST dari pengembang. Hal ini dinilai antara lain karena Pemprov DKI Jakarta belum optimal dalam mengintegrasikan Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait izin Pemanfaatan dan Pemenuhan Kewajiban, dan belum memiliki peta bidang tanah atas seluruh ruas jalan yang tercatat di KIB A. Kami sendiri juga menilai belum adanya data aset yang komprehensif dan transparan dari Pemprov DKI Jakarta mengenai data aset dan kerjasama aset dengan pihak lain, misalnya tentang lokasi aset, luas aset, dan nilai aset.

Mohon Tanggapan

3. Belanja Bantuan Sosial tidak tepat sasaran

Dari hasil LHP BPK didapatkan temuan 5.623 Penerima Bantuan Sosial yang Tidak Sesuai dengan kriteria dengan total senilai Rp 13.177.499.800,00 pada Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Sebanyak Rp 4.450.476.435.774 dengan realisasi senilai Rp 4.363.641.476.668 yang dialokasikan sebagai Belanja Bantuan Sosial (Bansos). Dari Realisasi tersebut sebanyak Rp 882.032.212.775 merupakan realisasi Bansos pada Dinas Sosial dan senilai Rp 3.481.609.263.893 merupakan realisasi Bansos pada Dinas Pendidikan,

Jika dirincikan lebih lanjut dalam LHP BPK tersebut, permasalahan pada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebanyak 1.209 Penerima bantuan sosial yang tidak memenuhi kriteria untuk Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Anak Usia Dini, Anak Jakarta dan Anak Remaja senilai Rp. 2.313.900.000. Berdasarkan data yang ada pada LHP BPK, sebagian besar penerima bansos yang tidak memenuhi kriteria tersebut diantaranya merupakan Penerima Bantuan Sosial KAJ, KPDJ, KLJ Yang Telah Meninggal Dunia sebanyak 891 Penerima dengan nilai anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 1.601.700.000. Berdasarkan LHP BPK tersebut juga Dinas Sosial tidak melakukan tindak lanjut mengenai penarikan dana yang masih mengendap di rekening penerima tersebut.

Selanjutnya, masih pada Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial terdapat 14 Penerima Bantuan Sosial Alat Bantu Penunjang Fisik yang diberikan kepada 14

Penerima yang tidak memenuhi kriteria senilai Rp 63.850.000. Berdasarkan rincian data yang tersaji pada LHP BPK tersebut 12 diantaranya merupakan Penerima Bansos berupa Kursi Roda yang telah meninggal dunia dengan anggaran senilai Rp 35.900.000.

- b. Pada Dinas Pendidikan, sebanyak 4.341 Penerima bantuan KJP Plus Tahap 2 Tahun 2023 yang tidak memenuhi kriteria dengan anggaran senilai Rp 10.268.749.800, dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Terdapat 30 Siswa Penerima Bantuan yang bukan Warga DKI Jakarta Senilai Rp 55.680.000;
 - ii. Terdapat 83 Siswa Penerima Bantuan yang telat mutasi kependudukan ke luar DKI Jakarta dan telah meninggal dunia senilai Rp 177.240.000;
 - iii. Terdapat 178 Siswa penerima beasiswa KJP Plus yang orang tuanya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - iv. Terdapat 869 Siswa Penerima bantuan pendidikan yang orang tuanya terindikasi berstatus TNI/Polri senilai Rp 2.293.735.800;
 - v. Terdapat 3.181 siswa/orang tua penerima bantuan yang tercatat memiliki kendaraan roda empat senilai

Padahal, sepanjang tahun 2023 sampai dengan saat ini banyak sekali fenomena-fenomena kontroversi mulai dari penghapusan data hingga keterlambatan pencairan dana bantuan sosial Pendidikan mulai dari KJP Plus hingga KJMU yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta.

Fraksi PSI sangat menyayangkan ketidaktepatan sasaran pengalokasian Bantuan Sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Padahal, saat Fraksi PSI melakukan reses hingga saat ini Fraksi PSI masih menerima banyak sekali aduan-aduan yang masuk mengenai program-program bantuan sosial yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta yang masih tidak dirasakan langsung oleh para warga yang membutuhkan.

Fraksi PSI mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, jika slogan "Sukses Jakarta Untuk Indonesia" Serta mimpi DKI Jakarta menjadi Kota Global ingin diwujudkan. Maka, harus benar-benar diupayakan melalui pembangunan manusia yang maksimal.

Mohon Tanggapan.

4. Rehab Total Bangunan Sekolah Tidak Dilaksanakan Dengan Tepat Waktu

Berdasarkan LHP BPK terdapat temuan mengenai permasalahan sangat penting terkait Rehab Total 27 Gedung Sekolah dengan anggaran senilai Rp 720,99 Miliar yang tidak dilaksanakan tepat waktu. Padahal, berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan

Tahun 2017 - 2022 saja, Program dan Kegiatan Rehab Sekolah menargetkan 393 Lokasi Gedung Sekolah yang akan direhab sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Namun, pada kenyataannya realisasi rehab gedung sekolah dan pembangunan unit sekolah baru dari tahun 2017 sampai dengan 2021 **hanya terlaksana sebanyak 333 lokasi**, dengan alasan anggaran pada tahun tersebut diprioritaskan untuk penanganan Covid-19.

Selain itu, berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2023 - 2026, pada Maret 2022 terdapat 227 Sekolah dari total 2.007 sekolah negeri yang mengalami kerusakan berat. Lalu, berdasarkan LHP BPK tersebut Pemprov DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2023 menganggarkan belanja modal gedung dan bangunan untuk pekerjaan rehab total gedung sekolah, **sebesar Rp 720.99 untuk 27 lokasi**. Namun, pada realisasinya rehab total gedung sekolah tersebut tidak terlaksana sama sekali dan mengakibatkan proses belajar mengajar di sekolah yang direhab total terdampak.

Tidak terealisasinya Rehab Gedung Sekolah tersebut juga terindikasi menyalahi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan SOP Nomor 3907/BPAD-PSDA/OT.05.17 tentang Identifikasi, Penelitian dan Pelaksanaan Pemindahtanganan BMD berupa bangunan.

Selanjutnya, berdasarkan penelusuran P2APBD yang kami lakukan juga terdapat penyerapan anggaran Dinas Pendidikan pada Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus dalam Sub-Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS yang dianggarkan sebesar Rp 1.227.337.000,00 yang hanya terealisasi senilai Rp 92.012.712,00 atau 7,5% dari anggaran yang dianggarkan. Tentunya, kedua hal ini harus menjadi catatan dan evaluasi penting bagi Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Fraksi PSI menyarankan bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta harus serius dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi para penerus bangsa dengan selalu memperhatikan segala aspek penting terutama pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

Mohon Tanggapan

5. Penyerapan Anggaran Pembangunan Puskesmas Pada Suku Dinas Kesehatan

Berdasarkan penelusuran P2APBD, kami menemukan bahwa Terdapat anggaran sebesar Rp.2.050.108.842,00 yang dianggarkan untuk Belanja Modal Bangunan Kesehatan yang hanya terealisasi sebesar Rp.1.243.474.836,00 atau hanya 60.65% dari total anggaran. Padahal dari aduan yang kami terima serta dikuatkan oleh data dari beberapa pemberitaan media sepanjang tahun 2023 menyatakan bahwa banyak warga yang mengeluhkan terkait tidak adanya Puskesmas di Kelurahan mereka. Jika diakumulasikan Total terdapat 15 Kelurahan yang tidak memiliki puskesmas di seluruh

Jakarta, yang 5 diantaranya merupakan kelurahan yang berlokasi di Jakarta Pusat yaitu Gambir, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Cikini, Senen, Karanganyar.

Mohon Tanggapan

6. Kurangnya Perhatian Penanganan Polusi Udara

Jakarta hingga hari ini, terbukti masih konsisten menjadi juara di dunia. **Juara dalam kategori polusi udara terburuk kelima di dunia.** Berdasarkan data IQAir tahun 2023 hingga sekarang, indeks kualitas udara Jakarta selalu berada di angka 140-200 dengan peringatan warna merah yang memiliki arti 'Tidak Sehat'. Lebih lanjut lagi, di tengah masalah polusi udara DKI Jakarta, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tercatat adanya lonjakan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor (mobil, sepeda motor, bus dan truk) dari sekitar 11,7 juta unit di 2018, menjadi sekitar 21,8 juta unit di 2022. Kemudian, di tahun 2023, jumlah kendaraan di DKI Jakarta tercatat terus melonjak menjadi 23 juta unit. Pembelian kendaraan pribadi di Jakarta yang terus meningkat membuktikan bahwa pelayanan transportasi publik di DKI Jakarta belum optimal. Bahkan berdasarkan hal krusial tersebut, penanganan polusi udara tidak diatasi dengan lebih serius terbukti dengan tidak adanya alokasi dana dari Dinas Lingkungan Hidup dalam APBD 2023 untuk menangani masalah terkait, dan sangat disayangkan tidak adanya pengajuan untuk kenaikan anggaran penanganan polusi udara pada Perubahan APBD 2023 ketika isu polusi udara telah menjadi pembicaraan nasional. Fraksi PSI menilai kualitas udara yang layak sudah sepatutnya menjadi hak setiap warga Jakarta.

Mohon Tanggapan

7. Isu Kampung Susun Bayam yang Tidak Selesai dan Berlarut-larut

Kami mengikuti dengan seksama proses berjalannya polemik yang terjadi pada warga masyarakat Kampung Bayam (KB) sejak masa pemerintahan Gubernur Anies sebelumnya. Kami melihat janji manis dari Pemprov kala itu sampai hari ini masih belum ada manfaat yang dirasakan sepenuhnya oleh warga masyarakat Kampung Bayam, Khususnya bagi para masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Warga Kelompok Tani Kampung Bayam Madani. Walaupun masyarakat sudah direlokasi ke Rusun Nagrak, akan tetapi jarak Rusun tersebut ke tempat aktivitas perekonomian serta sekolah bagi anak mereka terpaut belasan kilometer.

Padahal kala itu kami ingat, setelah proses Penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI melalui PT Jakpro dalam rangka pembangunan proyek mercusuar Jakarta International Stadium (JIS), masyarakat Kampung Bayam yang menempati tanah yang kini telah berdiri JIS tersebut dijanjikan akan direlokasi ke Rusun Kampung Susun Bayam, akan

tetapi hingga saat ini, warga masyarakat tidak memperoleh haknya walau hanya untuk mendapat kunci unit atas Rusun tersebut.

Kami sendiri pernah menyampaikan tawaran opsi agar permasalahan ini dapat segera selesai. Antara lain melakukan hibah KSB ke Disperum, dilakukan Perjanjian Kerjasama sama antar Pemprov DKI dengan Jakpro untuk wilayah JIS termasuk wilayah Kampung Bayam untuk pemanfaatan lahan, dan inbreg lahan khusus Kampung Bayam saja, bukan inbreg keseluruhan lahan JIS.

Fraksi PSI atas dasar kemanusiaan dan menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat mendorong Pemprov serta Jakpro untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan ini sehingga dapat memastikan kehidupan yang layak secara kemanusiaan dan hukum bagi masyarakat warga Kampung Bayam. Memastikan betul pembangunan Rusun dan fasilitas lainnya akibat kerugian terdampak proses relokasi tersebut dapat terakomodir dengan baik. Bagaimanapun mereka warga Jakarta, wajib hukumnya bagi Pemprov untuk melindungi serta mengedepankan kesejahteraan warga masyarakat kota Jakarta.

Mohon Tanggapan

8. Inefisiensi Anggaran pada Pelayanan Kesehatan Balita di Setiap Puskesmas DKI Jakarta

Pertama-tama Fraksi PSI mengapresiasi terhadap inisiasi-inisiasi program yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan setahun kebelakang untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat terutama dalam hal Perbaikan Gizi dan Pencegahan Stunting pada Anak. Akan tetapi, Fraksi PSI masih menemukan catatan-catatan penting yang dapat dijadikan evaluasi oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta terutama dalam Pelayanan Kesehatan Balita di Pusat Kesehatan Masyarakat pada setiap kecamatan di DKI Jakarta.

Berdasarkan temuan serta rekapitulasi anggaran yang sudah Fraksi PSI akumulasikan berdasarkan Anggaran di Setiap Puskesmas Kecamatan. Kami mencatat bahwa terdapat pola penganggaran yang dialokasikan cukup besar pada mata anggaran "**Belanja Natura dan Pakan Natura**" di Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita. Namun, pada realisasinya anggaran tersebut **selalu** meninggalkan anggaran yang cukup besar. Fraksi PSI mencatatkan bahwa terdapat Rp 14.777.244.579,00 yang tersebar di 44 Puskesmas Kecamatan di DKI Jakarta dengan rata-rata realisasi anggaran hanya kurang dari 70% (68,55%) anggaran yang sudah dialokasikan atau Rata-Rata Per Puskesmas Kecamatan menyisakan Rp. 101.797.427,57.

Padahal, berdasarkan Berdasarkan data serta pernyataan yang disampaikan oleh Plt. Dinas Kesehatan Jakarta pada September tahun 2023, menyatakan bahwa masih ada 39.793 balita tercatat memiliki permasalahan gizi. Jumlah itu terdiri dari 22.823 balita stunting, 9.191 balita kurang gizi, dan 5.753 balita kurang berat badan. Kemudian 2.026 balita mengalami gizi buruk. Fraksi PSI menanyakan terkait, *bagaimana keseriusan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam memperbaiki kualitas gizi anak terutama dalam melakukan intervensi program untuk pencegahan stunting pada anak? Karena, masih banyaknya anggaran yang tidak terserap secara maksimal pada seluruh Puskesmas perkecamatan di DKI Jakarta untuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Balita.*

Mohon tanggapan.

9. Penyerapan Anggaran Tenaga Ahli Gulkarmat yang Tidak Maksimal

Kurangnya penyerapan anggaran Belanja Tenaga Ahli sebesar 860 Juta dengan penyerapan sebesar 0 rupiah atau sama sekali tidak terserap. Padahal kami menerima adanya keluhan terkait adanya kebutuhan PJLP Penanggulangan Kebakaran yang masih tidak dapat diakomodir penambahannya. Sebagai catatan, kebutuhan petugas Gulkarmat di DKI Jakarta yang diperkirakan sebanyak 10.000 personel namun di DKI Jakarta saat ini hanya ada 4.000 petugas sehingga masih ada gap sebesar 6.000 personil, namun angka ini tidak dapat dipenuhi dengan pembukaan lowongan. Sehingga jika memang saat ini masih tidak ada kebutuhan tenaga ahli di Dinas Gulkarmat, sebaiknya Dinas Gulkarmat mengalokasikan anggaran untuk penambahan tenaga yang dapat berperan untuk membantu PJLP Penanggulangan Kebakaran, misalnya alokasi anggaran untuk relawan pemadam kebakaran

Mohon Tanggapan.

10. Belanja Sewa Komputer Jaringan Diskominfo dan Jakarta Smart City

Kami menemukan adanya jumlah belanja Sewa Komputer Jaringan yang sangat besar di Diskominfo dan UPT Jakarta Smart City. Jika dijumlahkan ada sekitar Rp 80 miliar. Namun di sisi lain kita mengetahui bahwa jumlah titik pemancar JakWifi mengalami penurunan jumlah dari tahun-tahun sebelumnya. Melihat hal tersebut sudah sepatutnya kita bertanya mengapa jumlah anggaran tersebut tetap diajukan dengan nilai yang fantastis. Apalagi sewa *bandwidth* internet di Indonesia khususnya di wilayah Kota Jakarta justru harganya mengalami penurunan harga sewa yang cukup signifikan setiap tahunnya. Terlebih penyewaan komputer jaringan juga dinilai tidak efektif karena seharusnya yang menjadi concern bagi diskominfo maupun UPT Jakarta Smart City adalah fokus dalam penganggaran untuk memperbaharui lisensi.

Mohon Tanggapan

11. Belanja Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai sangat rendah capaian realisasi disaat banjir rob selalu melanda pesisir Jakarta.

Dari hasil penelusuran P2APBD serta temuan LHP BPK pada Dinas Sumber Daya Air (SDA), secara spesifik pada bagian mata anggaran Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai lainnya, ditemukan Belanja modal pada bangunan pengaman sungai/pantai dari anggaran semula yang diajukan sebesar 84.999.999.982, tetapi hanya terealisasi 802.873.500 atau sekitar 0,94%. Artinya penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Seawall ini bahkan tidak mencapai 1% secara keseluruhan. Padahal di tahun 2023 kemarin, peristiwa banjir rob tentu menjadi ancaman yang serius bagi masyarakat pesisir Utara Jakarta, khususnya bagi masyarakat Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing dan Kalibaru yang memang selalu was-was ketika potensi banjir rob itu mengancam rumah-rumah mereka.

Fraksi PSI tentu menyayangkan jika setiap tahunnya dengan beberapa peristiwa banjir rob yang selalu mengintai warga Ibukota, Khususnya bagi warga pesisir utara Jakarta selalu dihantui rasa cemas dan takut akan nasib mereka yang terkena ancaman banjir rob setiap tahunnya. Banjir rob tidak hanya mengganggu aktivitas keseharian para warga masyarakat pesisir Jakarta, tetapi aktivitas perekonomian perikanan darat, kegiatan pelabuhan juga terkena dampak dari hal tersebut.

Mohon Tanggapan.

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Demikianlah penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Solidaritas Indonesia terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun Anggaran 2023

Sebagai kesimpulannya, kami ingin Pemprov DKI menjadikan APBD sebagai alat untuk pemerataan pembangunan sehingga mampu meningkatkan pemerataan tingkat kesejahteraan serta taraf hidup bagi semua elemen masyarakat. Fraksi PSI juga mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk terus memaksimalkan penyerapan anggaran terutama anggaran yang menasar pada program-program menyangkut kesejahteraan masyarakat luas karena hal itu merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk melindungi dan memberi pelayanan dasar kepada masyarakat kota Jakarta.

Akhir kata, kami harap catatan yang kami sampaikan di pandangan umum Fraksi PSI ini dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari PJ Gubernur dan jajarannya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Shalom, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Om Swastiastu.

Namo Buddhaya.

Salam Kebajikan.

Jakarta, 29 Juli 2024
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
DPRD DKI Jakarta

Ketua



William Aditya Sarana, S.H.

Sekretaris



Justin Adrian, S.H, M.H.



Partai NasDem

GERAKAN PERUBAHAN

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI NASDEM DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DKI
JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023**

Di bacakan Oleh :

NOVA HARIVAN PALOH, SE.,MM

(Wakil ketua Fraksi NasDem DPRD Provinsi DKI Jakarta)

Salam Restorasi!

Kepada Yang Terhormat.

- Pimpinan Sidang Paripurna.
- Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- Rekan – rekan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta.
- Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah DKI Jakarta
- Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Para Undangan dan Hadiran sekalian yang kami hormati.

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Shallom, Salam Sejahtera untuk kita semua

Om Swasti asthu Namu budaya

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada hari ini dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap pidato Gubernur DKI Jakarta dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.

Saudara Ketua Pimpinan Sidang, dan hadirin yang saya hormati, Fraksi NasDem kembali memberikan selamat atas capaian penghargaan tertinggi atas opini BPK "*Wajar Tanpa Pengecualian*" yang ke tujuh kali dari hasil audit atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023. Fraksi NasDem juga tidak lupa mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar dapat melakukan percepatan tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. Dikarenakan berdasarkan data LHP BPK untuk tahun Anggaran 2023, masih terdapat 1.263 rekomendasi yang belum di tindak lanjut dan berpotensi mengakibatkan kerugian sebesar Rp 5,5 Triliun lebih. Kerugian tersebut diantaranya adalah sebesar Rp 5,4 Triliun lebih nilai dari rekomendasi LHP BPK dengan status tindak lanjut rekomendasi Belum Sesuai, dan senilai Rp 120 miliar lebih nilai dari total rekomendasi yang belum ditindak lanjut. Hal ini menjadi pertanyaan bagi Fraksi Kami, dan mengindikasikan apakah ini merupakan alasan terlambatnya Laporan hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta sebagaimana yang

diamanatkan Undang – Undang No 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Oleh karena adanya potensi kerugian sebesar Rp 5,5 Triliun Lebih, Fraksi NasDem meminta Laporan tertulis kepada Pemprov DKI Jakarta secara terperinci sebanyak 1.263 rekomendasi dari LHP BPK yang Tindak lanjut rekomendasinya tidak sesuai ataupun Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. **Mohon Penjelasan!**

Berikut ini adalah beberapa catatan dan masukan dari Fraksi NasDem terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023, sebagai berikut :

Pertama, dalam hal pengelolaan aset daerah, Fraksi NasDem melihat permasalahan aset daerah setiap tahun anggaran, selalu menjadi temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Hal tersebut terkait dengan permasalahan pencatatan dan penatausahaan aset daerah yang dalam hal ini juga terkait dengan pemanfaatan aset daerah yang diberikan kepada pihak pengembang ataupun pihak ketiga, dan juga banyak juga di temukan pemanfaatan aset daerah pada Badan Layanan Umum Daerah tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur no 60 tahun 2019.

Selain itu juga adanya piutang daerah tidak tertagih yang seharusnya di bayarkan oleh pihak ketiga, dan adanya perjanjian kerja sama sewa aset daerah yang sudah berakhir namun asetnya masih digunakan oleh pihak ketiga. Fraksi NasDem memandang perlu adanya kerja yang lebih dari Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) beserta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta yang tidak hanya melakukan pencatatan, akan tetapi juga dapat melakukan penagihan, monitoring dan evaluasi. Sehingga BPAD tidak melakukan kerja pasif yang hanya menunggu

laporan dari pihak walikota, dan BPKD harus bisa mengoptimalkan kinerja monitoring dan evaluasi serta melakukan audit internal dalam rangka mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern (SPI), sehingga dapat meminimalkan kesalahan yang sama yang menjadi temuan dari hasil pemeriksaan BPK setiap tahunnya. **Mohon Penjelasan!**

Kedua, Dalam hal penyaluran Bantuan Sosial, Fraksi Nasdem masih menemukan penyaluran Bantuan Sosial yang tidak tepat sasaran yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan. Fraksi NasDem mendorong evaluasi dan monitoring secara berkala dalam hal penyaluran Bantuan Sosial. Selain itu permasalahan pada penerima bantuan KJP plus bagi siswa DKI Jakarta, Fraksi NasDem masih melihat lemahnya sistem verifikasi bagi penerima KJP plus, banyaknya temuan di lapangan dalam hal Verifikasi dan Validasi menjadi polemik yang tidak akan selesai bagi Pemprov DKI Jakarta, untuk itu Fraksi NasDem mendorong agar Pemprov DKI dapat melakukan revisi terkait dengan Keputusan Gubernur no 1250 tahun 2020 tentang Variabel Khas daerah untuk Pendataan dan Pemuktahiran data Fakir Miskin dan Orang tidak mampu sesuai dengan kriteria yang sesuai dengan kondisi lapangan sebenarnya. Terkait dengan permasalahan KJP plus dan KJMU yang selama ini yang pelayanannya di berikan tanggung jawab kepada Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Fraksi Nasdem mendorong agar P4OP terdapat di setiap level kecamatan, sehingga dapat mempermudah aksesibilitas warga DKI Jakarta dalam menyelesaikan permasalahan KJP plus dan KJMU. **Mohon Tanggapan!**

Masih terkait dengan permasalahan Pendidikan, Fraksi NasDem melihat pelaksanaan Penerima Peserta Didik Baru selalu menjadi

momok permasalahan PPDB setiap tahunnya. Permasalahan kuota penerimaan tidak sebanding dengan Calon Peserta Didik Baru (CPDB), disebabkan karena kurangnya sekolah negeri di DKI Jakarta. Oleh Karena itu Fraksi NasDem mendorong agar seluruh sekolah swasta agar menjadi gratis bagi semua siswa di DKI Jakarta. Selain itu Sekolah Gratis ini juga akan menjadi solusi bagi Dinas Pendidikan agar CPDB mendapatkan kesempatan mengikuti jenjang pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945. **Mohon Tanggapan!**

Ketiga, Dalam hal program prioritas pemenuhan Upaya Kesehatan, Pemprov DKI Jakarta telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 2,8 triliun lebih. Fraksi NasDem masih menemukan lambatnya penanganan kasus prevelensi stunting di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini ditunjukkan berdasarkan data hasil Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), dengan total kasus stunting sebanyak 37.816 kasus, dan baru yang di selesaikan sebanyak 7.522 kasus. Sehingga masih tertinggal 30.294 kasus yang belum terselesaikan. Fraksi NasDem memandang perlunya saudara PJ Gubernur, dimana juga sebagai ketua tim pengarah TPPS tersebut agar dapat melakukan evaluasi kinerja dan juga mencari program yang lebih inovatif dan baik lagi dalam mempercepat penyelesaian kasus stunting tersebut. **Mohon Penjelasan!**

Berikutnya juga terkait dengan pemenuhan upaya kesehatan, yang merujuk pada data Indikator kesejahteraan rakyat DKI Jakarta pada tahun 2023 yang di keluarkan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta, menunjukkan tingkat morbiditas tahun 2023 mengalami lonjakan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya. Fraksi NasDem menemukan pada tahun 2022 tingkat Morbiditas berada di angka 4,31 persen, sedangkan di tahun 2023 tingkat Morbiditas berada di

angka 8,44 persen. Angka pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah gagal dalam menentukan program kesehatan yang baik bagi warga DKI Jakarta. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa DKI Jakarta merupakan kota yang tidak baik derajat kesehatannya dan tidak di dukung oleh pemenuhan upaya kesehatan yang baik. **Mohon Tanggapan!**

Keempat, terkait dengan efektivitas upaya pemerintah daerah untuk pemajuan kebudayaan dalam rangka mendukung pembangunan daerah, setelah Fraksi NasDem menelaah bahwa nilai dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ekonomi budaya masih berada di bawah nilai dimensi IPK Ekonomi Budaya Nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan adalah untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri Bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi perkembangan peradaban dunia. Hal ini mengacu kepada Indeks Pembangunan Kebudayaan yang pada prakteknya seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta seharusnya tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur secara fisik semata yang harus menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta dalam penggunaan APBD, akan tetapi pembangunan infrastruktur non fisik yang mengarah kepada pembangunan kebudayaan menjadi penting. Fraksi NasDem memandang perlu agar Pemprov DKI Jakarta lebih memperhatikan :

- Agar tidak membatasi pelaksanaan program / kegiatan dalam mendukung tujuan pemajuan kebudayaan
- Mengoptimalkan mekanisme pemenuhan sumber daya dan pelibatan masyarakat dalam rangka memberikan ruang kepada penggiat seni

- Mengoptimalkan pemanfaatan warisan budaya, terutama pemanfaatan Cagar Budaya, Objek Pemajuan Kebudayaan, dan objek yang Diduga Cagar Budaya secara maksimal, dan juga melestarikan kebudayaan secara digital agar dapat berpengaruh dalam hubungan Internasional. **Mohon Tanggapan!**

Kelima, Berdasarkan hasil data yang diperoleh Fraksi NasDem, yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024, Fraksi NasDem masih menemukan sebanyak **8.447** aspirasi masyarakat yang diperoleh dari hasil reses tahun 2021 sampai dengan 2023 yang belum diakomodir. Salah satu contoh dari hasil reses tersebut adalah normalisasi saluran air yang dapat menyebabkan terjadinya banjir jika terjadi curah hujan yang tinggi. Kemudian Tidak diakomodirnya total hasil reses ini akan berdampak kepada citra buruk dari masyarakat kepada legislatif dengan masih banyaknya ditemukan usulan reses yang belum diakomodir oleh Pemprov DKI Jakarta di tahun 2023. Oleh Karena itu Fraksi NasDem meminta kepada Pemprov DKI Jakarta agar dapat menindaklanjuti hasil Reses Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan lebih serius dan efektif. **Mohon Penjelasan!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Demikian Pemandangan Umum ini kami sampaikan, Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mengingatkan kepada Pemprov DKI Jakarta agar dapat meminimalisir kembali permasalahan – permasalahan yang selalu muncul dalam Pelaksanaan Anggaran APBD Provinsi DKI Jakarta, meningkatkan Sistem Pengendali Intern (SPI) agar semua pelaksanaan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta memberikan perhatian lebih kepada pembangunan Sumber Daya Manusia yang berbudaya

tidak hanya kepada pembangunan Infrastruktur secara fisik. Semoga Allah SWT tetap meridhoi segala usaha dan pekerjaan kita untuk DKI Jakarta yang lebih baik. Amin.

Wabillahitaufiq walhidayah Wasaalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. **Salam Restorasi!**

Jakarta, 29 Juli 2024

Fraksi NasDem DPRD Provinsi DKI Jakarta

Ketua,

WIBI ANDRINO, SH.,MH

Sekretaris,

ABDUL AZIS MUSLIM, SH



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023



DISAMPAIKAN OLEH : DIMAZ RADITYA, SE.
Jakarta, 29 Juli 2024

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

Disampaikan oleh : Dimaz Raditya, SE

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Yth. Sdr. Ketua, para Wakil Ketua/Pimpinan Rapat Paripurna Dewan;
Sdr. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
Sdr. Para Anggota DPR-RI dan DPD-RI dari dapil Provinsi DKI Jakarta;
Sdr. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah DKI Jakarta;
Sdr. Sekretaris Daerah dan Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
Sdr. Rekan-rekan Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR, kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi terhadap **Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.**

Pada kesempatan ini, saya mewakili Fraksi Partai Golkar menyampaikan Selamat Hari Anak Nasional yang diperingati pada tanggal 23 Juli 2024 lalu. Anak adalah tonggak utama kemajuan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, dengan anak yang berkualitas, kita akan mewujudkan negara yang jauh lebih berkualitas di masa depan. Selamat Hari Anak Nasional. Jayalah terus anak-anak Indonesia. **Amin.**

Sdr. Pimpinan Rapat, Pj. Gubernur dan Hadirin yang terhormat;

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Pj. Gubernur atas Pidato penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan atas beberapa pencapaian positif dalam pengelolaan keuangan tahun 2023.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 telah berhasil mempertahankan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** yang merupakan penghargaan tertinggi atas akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023. Fraksi Partai Golkar berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan agar akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat memberi manfaat lebih banyak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Dalam Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dijelaskan bahwa Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.71 triliun dari target sebesar Rp.70,6 triliun, di mana realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.49,1 triliun atau melewati dari target sebesar Rp.48,5 triliun. Sedangkan realisasi Belanja Daerah Rp.66,7 triliun dari target sebesar Rp.64,8 triliun. Selanjutnya, realisasi penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp 8,8 triliun dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp 6,6 triliun dari anggaran sebesar Rp 7,4 triliun. Realisasi ini meningkat Rp 2,1 triliun dari pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2022 sebanyak Rp 4,5 triliun.

Dari realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 mencapai Rp 6,6 triliun. Meskipun terdapat penurunan jumlah Silpa sebesar Rp 2 triliun dari SiLPA tahun 2022, Fraksi Partai Golkar menilai bahwa realisasi anggaran belum optimal karena lebih banyak untuk belanja aparatur, seharusnya lebih banyak belanja modal bagi pelayanan warga. Oleh karena itu Fraksi Partai Golkar memberikan beberapa catatan atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 sebagai berikut :

1) Realisasi Pendapatan Daerah

Fraksi Partai Golkar mempertanyakan terkait dengan rendahnya capaian Pendapatan Denda Pajak hanya terealisasi 63,24 persen dan Pendapatan Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah hanya terealisasi 60,18 persen. Serta capaian penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah hanya terealisasi 35,69 persen yang masih jauh dari target yang ditetapkan. **Mohon penjelasan!**

2) **Program Pengelolaan Pendidikan**

Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,5 triliun untuk program pengelolaan pendidikan dan terealisasi sebesar Rp8,87 triliun. **Fraksi Partai Golkar** menilai penyerapan anggaran tersebut tidak sesuai dengan realita yang terjadi, yaitu masih semrawutnya pendataan penerima KJP dan KJMU yang dinilai tidak tepat sasaran, tidak adil dan tidak merata, banyaknya ijazah yang tertahan di sekolah-sekolah swasta akibat tunggakan biaya sekolah yang tidak mampu dilunasi oleh siswa yang bersangkutan dan masih banyak siswa sekolah swasta yang dipulangkan dari sekolah akibat tidak sanggup membayar iuran SPP serta masih banyaknya siswa putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar biaya sekolah. **Mohon penjelasan!**

Sesuai dengan argumen dan fakta-fakta diatas, **Fraksi Partai Golkar** mendorong agar Pemprov DKI Jakarta dapat menggratiskan biaya pendidikan di sekolah-sekolah swasta sehingga warga DKI Jakarta mampu mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat. **Mohon tanggapan!**

3) **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Program Penyelenggaraan Jalan**

Program ini merupakan salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menangani kemacetan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7,7 triliun dan realisasinya sebesar Rp7,04 triliun. Fraksi Partai Golkar menilai kondisi di lapangan tidak sesuai dengan penyerapan anggaran yang terjadi. Menurut pengamatan **Fraksi Partai Golkar** kemacetan di Jakarta kian bertambah parah apabila dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini dibuktikan dengan data TomTom Traffic Index yang menyatakan bahwa pada tahun 2022 untuk menempuh jarak 10 km di Jakarta hanya membutuhkan waktu 22 menit 40 detik sedangkan pada Tahun 2023, untuk menempuh jarak 10 km membutuhkan waktu rata-rata 23 menit 20 detik. Ada selisih waktu lebih lambat 40 detik dari tahun 2022 ke tahun 2023. **Mohon penjelasan!**

4) **Program Pengendalian Banjir**

Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,93 triliun dan terealisasi sebesar Rp1,48 triliun. Namun menurut pengamatan Fraksi Partai Golkar, pada awal tahun 2024 masih ada 13 RT yang terdampak banjir yaitu 2 RT di Jakarta Barat, 9 RT di Jakarta Selatan dan 2 RT di Jakarta Timur serta 8 ruas jalan yang tergenang banjir. Selain

itu, pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang ditargetkan selesai pada tahun 2028 namun sampai dengan saat ini progress pengerjaan baru mencapai 5,9%. Hal ini menurut Fraksi Partai Golkar akan mengganggu penyelesaian NCICD pada tahun 2028. **Mohon penjelasan!**

5) Pentingnya Sistem pemantauan penarikan pajak secara real time online terhadap aset-aset Pemprov DKI

Untuk memastikan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ataupun badan usaha milik daerah (BUMD) yang mengelola aset-aset dan venue Pemprov DKI Jakarta, maka pelaksanaan penarikan pajak daerah dari aset atau venue milik Pemprov DKI Jakarta perlu sistem pemantauan secara real time online. Dengan adanya pengawasan yang baik, diharapkan pajak dapat masuk tepat waktu tanpa adanya penunggakan. Disisi lain, sistem ini akan memantau kepatuhan penyewa terhadap pembayaran pajak. Hal ini akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Bagi **Fraksi Partai Golkar**, sistem ini sangat penting karena dapat mengintegrasikan berbagai data terkait penarikan pajak dan penggunaan aset, memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang pendapatan dari aset yang disewakan. Nantinya Pemprov dapat membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi yang akurat dan terbaru. Dan bisa membantu dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan aset yang lebih baik. **Mohon tanggapan!**

6) Belum Optimalnya Mitigasi Kebakaran

Jumlah kasus kebakaran di DKI Jakarta sepanjang tahun 2023 yaitu mencapai sekitar 2.286 kebakaran, meningkat dibanding tahun 2022. Kasus kebakaran tersebut didominasi oleh korsleting listrik atau hubungan arus pendek. Permasalahan lainnya adalah jumlah pos pemadam kebakaran saat ini belum memadai, hanya ada 170 pos. Seharusnya satu kelurahan memiliki satu pos pemadam kebakaran. Lalu jumlah personil yang ada saat ini adalah 3.800, belum cukup menjangkau 44 Kecamatan dan 267 Kelurahan. Jumlah tersebut masih jauh dari angka ideal yang dibutuhkan oleh Dinas Gulkarmat DKI sesuai rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yaitu memiliki 11.200 personil. Kekurangan tersebut akan sangat mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Fraksi Partai Golkar ingin mengetahui sejauh mana alokasi anggaran APBD tahun 2023 dalam memenuhi kebutuhan Dinas Gulkarmat? Bagaimana langkah Pemprov DKI Jakarta menanggulangi permasalahan tersebut? **Mohon Penjelasan!**

7) Polusi Udara

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bahwa sektor transportasi berkontribusi sebesar 44% dari penggunaan bahan bakar di Jakarta, diikuti industri energi 31%, lalu manufaktur industri 10%, sektor perumahan 14%, dan komersial 1%. Memasuki musim kemarau saat ini, polusi udara akan semakin memburuk karena adanya konsentrasi polutan.

Fraksi Partai Golkar berharap kebijakan Pemprov DKI Jakarta fokus pada 3 sektor yaitu transportasi, industri dan pembangkitan listrik serta lingkungan hidup. **Mohon tanggapan!**

8) Target RTH 30 Persen

Pemprov harus memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Standar ideal proporsi RTH wilayah kota yang diatur undang-undang tersebut yakni 30 persen dari luas wilayah kota. Pada tahun 2023 Jakarta baru memiliki RTH seluas 33,34 juta meter persegi atau 5,2 persen dari total luas wilayah masih sangat jauh dari target 30 persen sesuai amanat undang-undang.

Fraksi Partai Golkar berharap Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta segera menjadikan aset yang telah dibebaskan dan lahan milik Distamhut dapat segera dimanfaatkan untuk menjadi RTH. **Mohon tanggapan!**

9) Perbaiki Cakupan Layanan Air Bersih

Cakupan layanan air bersih di Jakarta pada tahun 2023 baru mencapai 67 persen. Ini menunjukkan bahwa masih banyak rumah tangga yang tidak dapat mengakses air bersih, yang merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting. Hal ini harus menjadi perhatian serius karena masih banyak masyarakat belum bisa menikmati air bersih. Mengingat Jakarta sedang menuju status sebagai kota global, sehingga pemerataan dan cakupan air bersih menjadi tantangan serius bagi Pemprov DKI Jakarta. Oleh karena itu, **Fraksi Partai Golkar** mendorong Perumda PAM Jaya untuk memprioritaskan peningkatan cakupan layanan air bersih di tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya agar mencapai 100

persen. Juga perlu upaya intensif dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mengatasi kendala-kendala seperti perizinan, kebocoran dan percepatan pembangunan pipa serta tersumbatnya jalur pipa yang menyebabkan pekerjaan teknis PAM Jaya terhambat. **Mohon tanggapan!**

10) Penagihan dan Pencatatan Fasos Fasum Belum Optimal

Pemprov DKI Jakarta belum optimal melakulan penagihan serta pencatatan aset berupa fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) di Jakarta. mengingat masih banyak aset belum diserahkan oleh pengembang yang merupakan kewajiban terhadap Pemprov DKI. Bahkan aset yang dimiliki pun belum tercatat dengan baik dan rawan berpindah kepemilikan.

Seharusnya Pemprov dalam hal ini Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) membuat mekanisme penagihan hingga pencatatan aset. Sehingga tak ada lagi keterlambatan dari para pengembang untuk menyerahkan asetnya kepada Pemprov DKI. **Fraksi Partai Golkar** menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus lebih tegas dalam melakukan penagihan kewajiban pengembang dengan memberikan sanksi tegas kepada pengembang Pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) yang abai dengan kewajibannya. **Mohon tanggapan!**

11) Pembangunan dan Pemeliharaan RPTRA

Fraksi Partai Golkar mendorong agar Pemprov DKI melakukan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang dekat dengan wilayah padat penduduk. Juga pembangunan dibawah rel kereta api dengan bekerjasama dengan PT.KAI. Sehingga fasilitas tersebut dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Fraksi Partai Golkar juga menyayangkan sejumlah fasilitas di beberapa RPTRA sudah rusak dan tidak terawat. RPTRA yang sudah berusia dua tahun seharusnya di evaluasi untuk mengetahui apa saja kerusakan dan kebutuhan. Maka kami mendorong Pemprov beserta dinas terkait rutin melakukan pemeliharaan agar fasilitas yang sudah dibangun tidak terbengkalai. **Mohon tanggapan !**

Sdr. Pimpinan Rapat, Gubernur dan Hadirin yang terhormat;

Demikianlah Penyampaian Pemandangan Umum **Fraksi Partai Golkar** terhadap **Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.**

Fraksi Partai Golkar berharap pertanyaan, pandangan, kritik dan saran yang disampaikan seluruhnya mendapatkan tanggapan dan penjelasan dari Pj. Gubernur dan jajarannya.

Izinkan kami menyampaikan satu-dua bait pantun sebagai penutup :

*Sinar mentari di pagi hari,
Burung berkicau di pohon bambu.
Warga Jakarta hidup berseri,
APBD terpakai untuk kemajuan ibu kota*

*Naik becak keliling kota,
Singgah sebentar di pasar bunga.
APBD 2023 terserap merata,
Jakarta maju, rakyat sejahtera*

Bilahir Taufiq Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

SUARA RAKYAT, SUARA GOLKAR !!!

Jakarta, 29 Juli 2024

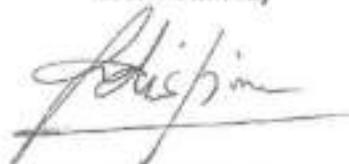
**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,



BASRI BACO, SE., MM.

Sekretaris,



JUDISTIRA HERMAWAN, B. Bus



PEMANDANGAN UMUM
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa –
Partai Persatuan Pembangunan
DPRD Provinsi DKI Jakarta
terhadap
Rancangan Peraturan Daerah
tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023

Disampaikan oleh:
H. YUSUF, S.I.Kom

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Yang kami hormati:

Sdr. Pimpinan Rapat;

Sdr. Penjabat Gubernur DKI Jakarta beserta Jajarannya;

Sdr. Rekan-Rekan Anggota DPRD DKI Jakarta;

Serta Para Undangan dan Hadirin Sekalian Yang Berbahagia.

Salam sejahtera kami sampaikan semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat, sukses dalam beraktifitas dan senantiasa membela rakyat. Amin.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum ini marilah kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, sholawat, salam serta keberkahan semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan terbaik dalam semua aspek kehidupan. Marilah kita perbanyak bacaan Sholawat kepada Baginda Rasulullah SAW. Semoga kita kelak mendapat *syafa'atul udzma* Beliau. *Aamiin Ya Robbal 'Alamin*.

Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara Penjabat Gubernur yang sebelumnya telah menyampaikan Pidato Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Penjabat Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

Dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Kepala Daerah Bertanggung Jawab atas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan demikian pula dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta ditegaskan bahwa Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ketentuan Perundang-undangan tersebut diatas tegas memberi amanat kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangannya.

Kami berpandangan bahwa penyampaian Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 ini adalah implementasi dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akuntable dan transparan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Sebagaimana diketahui bahwa struktur APBD kita terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Kami mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang

berhasil melewati target Pendapatan Daerah tahun 2023, dengan realiasi sebesar Rp.71,07 triliun atau mencapai 100,57 persen dari target semula Rp.70,66 triliun.

Terlebih lagi peningkatan pendapatan daerah tersebut disumbangkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencerminkan membaiknya kinerja perekonomian di wilayah DKI Jakarta. Sebagaimana dilaporkan saudara Gubernur, PAD tahun 2023 terealisasi Rp.49,14 triliun atau mencapai 101,44 persen dari target Rp.48,44 triliun. Adapun Transfer dari Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp.20,16 triliun atau 99,68 persen dari target Rp.20,22 triliun, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah terealisasi sebesar Rp.1,77 triliun atau 88,46 persen dari target Rp.1,99 triliun.

Sedangkan Belanja Daerah, penjelasan Saudara Gubernur terealisasi sebesar Rp.66,77 triliun atau 92,55 persen dari target Rp.72,14 triliun, dengan rincian: (1) Belanja Operasi terealisasi Rp.57,56 triliun atau 95,32 persen dari anggaran Rp.60,38 triliun, (2) Belanja Modal terealisasi Rp.8,86 triliun atau 81,63 persen dari anggaran Rp.10,85 triliun, (3) Belanja Tidak Terduga tidak ada realisasi dari anggaran Rp.554,56 miliar dan (4) Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi Rp.356,45 miliar atau 100 persen dari anggaran.

Adapun Pembiayaan Daerah, dijelaskan Saudara Gubernur, terdiri dari (1) Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp.8,89 triliun yang diantaranya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun 2022 sebesar Rp.8,60 triliun, dan (2) Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.6,64 triliun diantaranya digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Perumda Air Minum Jaya, Perumda Dharma Jaya, PT. Jakarta Propertindo, PT. Jakarta Tourisindo, dan PT. MRT Jakarta.

Adapun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023, dijelaskan saudara Gubernur, sebesar Rp.6,54 triliun berasal dari realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan diatas.

Kami juga mengapresiasi Hasil Audit atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian". Kami berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan secara konsisten setiap tahunnya.

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Penjabat Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

DPRD Provinsi DKI Jakarta termasuk Fraksi PKB-PPP sejak akhir April lalu telah melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tahun 2023 melalui rapat-rapat Komisi bersama mitra kerjanya masing-masing. Setiap Komisi telah memiliki catatan penting hasil evaluasi di bidang pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan dan kesejahteraan sosial. Hasil evaluasi setiap Komisi sudah ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 3 Mei 2024 dalam bentuk Rekomendasi LKPJ APBD Tahun 2023 dan telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kami mengingatkan kembali amanat Pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bahwa Rekomendasi hasil evaluasi LKPJ APBD Tahun 2023 yang disampaikan Dewan tersebut harus dijadikan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan penyusunan anggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan terhadap kebijakan strategis Kepala Daerah.

Kami tidak akan mengulang-ulang hasil evaluasi Dewan yang telah direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun kami akan menyampaikan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian kita bersama dan perlu mendapat tanggapan dari saudara Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

1. Masalah pendidikan gratis bagi siswa sekolah swasta di Jakarta perlu segera dirumuskan Program pendidikan gratis merupakan amanah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, khususnya Pasal 16 huruf (f) berbunyi *"Pemerintah daerah wajib menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar"*.

Selama ini, banyak siswa dari keluarga status ekonomi kurang mampu justru tidak dapat kesempatan masuk sekolah negeri. Ironisnya, siswa tersebut tidak terdaftar sebagai penerima bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Karena itu kami berpendapat bahwa program pendidikan gratis ini sebagai upaya pemerataan pendidikan yang merupakan hak seluruh warga Jakarta.

Kami meminta Dinas terkait untuk segera merumuskan program ini dengan fokus utama memberikan pendidikan gratis terhadap siswa sekolah swasta dari keluarga tidak mampu sesuai Amanah Perda diatas.

2. Masalah cakupan air bersih di Jakarta hingga tahun 2023 baru mencapai 67 persen. Artinya, masih banyak rumah tangga di Jakarta yang belum bisa mengakses air bersih yang merupakan kebutuhan dasar.

Kami meminta PDAM Jaya segera berbenah agar cakupan layanan air bersih bisa mencapai 100 persen. Termasuk di antaranya proaktif melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengatasi kendala tersumbatnya jalur pipa yang menyebabkan pekerjaan teknis PDAM Jaya terhambat.

3. Masalah normalisasi Ciliwung khususnya di daerah kelurahan Pejaten Timur. Sejak ditetapkannya penunjukan lokasi dan terkena peta trase pembebasan normalisasi sungai Ciliwung masyarakat menjadi resah. Di satu sisi, masyarakat tidak mendapat kepastian kapan akan dibebaskan. Sementara itu di sisi lain, masyarakat kesulitan mengurus sertifikat karena tanahnya terkena penlok.

Kami meminta solusi kongkrit untuk masalah ini. Segera dilakukan pembebasan atau dicabut ketetapan penloknya agar masyarakat bisa mengurus sertifikat tanahnya.

Mohon tanggapan saudara Penjabat Gubernur terhadap catatan-catatan kami diatas.

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Penjabat Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

Pada prinsipnya kami dapat menerima dan menyetujui Raperda ini untuk dibahas lebih lanjut oleh Dewan bersama dengan Jajaran Eksekutif terkait untuk nanti pada saatnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Demikianlah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa – Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Demikianlah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa – Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Terimakasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.

Wallohul Muwaffiq Ilaa Aqwamit Thorieq

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Jakarta, 29 Juli 2024

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA –
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua



H. Hasbiallah Ilyas, S.Ag

Sekretaris



H. Sutikno